SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kawasan Perdesaan Wikabalung Tahun Kecamatan Kedungbanteng 2026-2030;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menyusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 2

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2030.
(2) Kawasan Perdesaan Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Desa di Kecamatan Kedungbanteng meliputi:
    a. Desa Windujaya;
    b. Desa Kalisalak;
    c. Desa Baseh; dan
    d. Desa Melung.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dalam:

a. percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial di Kawasan Perdesaan Wikabalung;
b. mendorong pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan Wikabalung guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar Kawasan; dan
c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. RPKP Wikabalung;
b. tim koordinasi;
c. pelaksanaan;
d. pendanaan; dan
e. pelaporan dan evaluasi.

BAB II
RPKP WIKABALUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Kawasan Perdesaan Wikabalung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam dokumen RPKP Wikabalung.
(2) RPKP Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung sebagai landasan yang akan digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Perdesaan Wikabalung.
(3) RPKP Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

(4) RPKP Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. isu strategis Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   e. indikator capaian kegiatan; dan
   f. kebutuhan pendanaan.
(5) RPKP Wikabalung selaras dengan:
   a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
   b. dokumen perencanaan Daerah; dan
   c. penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

Bagian Kedua
Sistematika RPKP

Pasal 7

(1) Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
   a. bab I : pendahuluan;
   b. bab II : deskripsi dan kondisi Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   c. bab III : delineasi dan potensi produk Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   d. bab IV : pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis produk unggulan dan pendukung; dan
   e. bab V : penutup.

(2) Dokumen RPKP Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 8

(1) TKPKP Daerah menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung sesuai dengan lingkup kewenangannya.
(2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unsur Perangkat Daerah yang terkait;
   b. camat;
   c. kepala Desa;
   d. kepala badan kerjasama antar Desa; dan
   e. tokoh masyarakat.
(3) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
   a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   b. mengkoordinasikan penyusunan RPKP Wikabalung;

c. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dalam hal ditunjuk oleh Bupati; dan
d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

(4) Jumlah keanggotaan TKPKP Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.
(5) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan Wikabalung.
(2) Pendamping Kawasan Perdesaan Wikabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
a. membantu TPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan Wikabalung; dan
b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Penyesuaian terhadap RPKP Wikabalung harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Daerah, serta penyandang dana.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung yang berskala lokal Desa wajib disertakan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerjasama antar Desa.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan pada Daerah untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung berdasarkan asas tugas pembantuan.
(5) Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung juga dapat melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk pembahasan dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan

c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

(3) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. menyebarluaskan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung;
   b. menghadiri musyawarah Desa; dan
   c. berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi dan Daerah;
   c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

(3) Dalam hal pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

(4) Dalam hal pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(5) Dalam hal pendanaan bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

(6) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung harus mengacu pada RPKP Wikabalung.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan RPKP Wikabalung dan rencana kegiatan tahunan Kawasan Perdesaan Wikabalung.

(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana dan pelaksanaan RPKP Kawasan Wikabalung pada periode berikutnya.
(3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung pada Tahun 2026.

Pasal 14

(1) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing pelaksanaan pembangunan:
    a. Kawasan Perdesaan Wikabalung;
    b. TKPKP Kawasan; dan
    c. TKPKP Daerah.
(2) Evaluasi dilaksanakan dalam aspek:
    a. serapan anggaran;
    b. capaian kerja masing-masing kegiatan;
    c. masalah yang dihadapi; dan
    d. solusi atas masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(3) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2026-2030

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) AGROWISATA WIKABALUNG TAHUN 2026 – 2030






PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5
C. Landasan Hukum 5
BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN 7
A. Fisik Daerah Lahan dan Lingkungan 7
1. Topografi 7
2. Geomorfologi 7
3. Geologi 8
4. Penggunaan Lahan 11
5. Kebencanaan 13
B. Ekonomi 14
1. Pertanian Tanaman Pangan 14
2. Peternakan dan Perikanan 15
3. Pariwisata 16
C. Kependudukan dan Sosial Budaya 17
1. Jumlah Penduduk 17
2. Pertumbuhan Penduduk 17
3. Kepadatan Penduduk 18
4. Rasio Jenis Kelamin 19
5. Tingkat Pendidikan Penduduk 20
6. Jenis Pekerjaan Penduduk 21
D. Sarana dan Prasarana 22
1. Prasarana Pendidikan 22
2. Prasarana Kesehatan 23
3. Prasarana Sosial Budaya 24
4. Situs Budaya 25
5. Prasarana Perdagangan 25
6. Prasarana Pemerintahan 26
7. Prasarana Olah Raga 27
E. Kelembagaan 27
F. Perkembangan Desa (IDM) 28
BAB III DELIENASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN 30
A. Delineasi Kawasan Perdesaan 30
B. Potensi Produk Kawasan Perdesaan 30

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG 32
A. Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung 32
B. Tujuan dan Sasaran Klaster 32
C. Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung 33
1. Identifikasi Komoditas Unggulan 33
2. Peta Sebaran dan Skala Usaha 33
3. Analisis Klaster (Pendekatan Porter's Diamond) 33
4. Tantangan dan Permasalahan 34
5. Strategi Pengembangan Klaster 35
6. Rekomendasi Program Prioritas 36
2. Analisis Klaster (Porter's Diamond) 37
3. Permasalahan Utama 38
4. Visi Pengembangan 39
5. Strategi Klaster Wisata Wikabalung 39
D. Analisis Skala Prioritas Kegiatan 40
E. Rencana Kegiatan 44
BAB V PENUTUP 55

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu strategi dalam mengatasi berbagai persoalan di desa dan wilayah perdesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sejumlah peraturan turunannya, termasuk Permendesa Nomor 05 Tahun 2016 mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dimaknai sebagai pembangunan lintas desa yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Kabupaten Banyumas sendiri memiliki karakteristik perdesaan yang kuat, terlihat dari komposisi wilayahnya yang didominasi oleh desa sebanyak 301 desa, sementara kelurahannya hanya berjumlah 30.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. Upaya ini berhubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan desa, sehingga perlu adanya dorongan terhadap potensi ekonomi lokal sekaligus penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Secara umum, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kaitan antara pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan terletak pada fungsi kawasan yang berfokus pada aktivitas utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, permukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan dan sosial, serta kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan menjadi penting karena adanya ketimpangan perkembangan antarwilayah, di mana sebagian wilayah berkembang lebih lambat dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus mengedepankan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

Kabupaten Banyumas merupakan daerah dengan mayoritas wilayah yang memiliki karakteristik pedesaan. Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas kawasan perdesaan memiliki luas 119.943,79 dari total luas wilayah 132.759 hektar. (139.144,23 ha).

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai acuan pembangunan Desa, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan beberapa Kawasan perdesaan. Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 410/1027 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Kawasan Perdesaan Wikabalung terdiri dari 4 desa yaitu Desa Windujaya, Desa Kalisalak, Desa Baseh, dan Desa Melung di Kecamatan Kedungbanteng. Sesuai Permendes Nomor 5 Tahun 2020 Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersebut diamanahkan untuk memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Oleh karena itu perlu disusun Kajian Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa sehingga terwujud kawasan agrowisata yang menyejahterakan seluruh masyarakat di kawasan perdesaan.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan RPKP Wikabalung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

BAB II
DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

A. Fisik Dasar Lahan dan Lingkungan

1. Topografi

Kawasan Perdesaan Wikabalung secara topografis didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 500–1500 meter di atas permukaan laut, yang mencapai luas 1.175,82 hektar atau lebih dari separuh total wilayah. Kondisi ini sesuai dengan letak geografis kawasan yang berada di kaki Gunung Slamet, sehingga membentuk bentang alam perbukitan dengan udara sejuk dan tanah yang relatif subur. Topografi seperti ini sangat mendukung pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kopi dan kapulaga, serta kegiatan wisata alam berbasis lanskap pegunungan.

Selain itu, terdapat pula wilayah dengan ketinggian 200–500 meter seluas 850,19 hektar. Zona ini umumnya dimanfaatkan sebagai area permukiman, lahan pertanian campuran, serta akses jalan penghubung antar desa. Sementara itu, kawasan dengan ketinggian 0–200 meter hanya mencakup area yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,52 hektar, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur ruang kawasan secara keseluruhan.

Dengan total luas 2.026,54 hektar, struktur topografi Kawasan Perdesaan Wikabalung menegaskan karakter utamanya sebagai daerah perdesaan berbasis pertanian dan wisata alam. Namun, kondisi ketinggian yang bervariasi juga menimbulkan tantangan, terutama dalam penyediaan aksesibilitas dan infrastruktur, mengingat sebagian wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 meter relatif sulit dijangkau. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perlu memperhatikan karakteristik topografi ini agar strategi pembangunan, baik sektor pertanian maupun pariwisata, dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.
Luas dan Kelas Ketinggian Kawasan Perdesaan Wikabalung

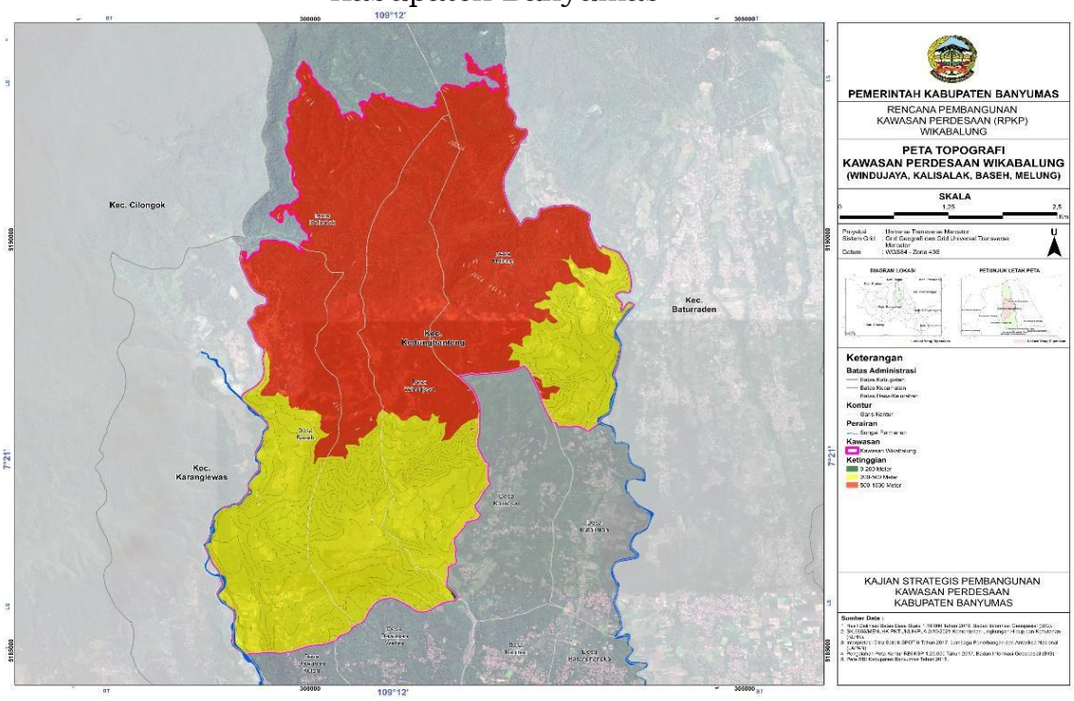
No	Kelas Ketinggian	Luas (Ha)
1	500 – 1500 Meter	1175,823
2	200 – 500 Meter	850,194
3	0 – 200 Meter	0,524
	TOTAL	2026,541

Sumber: Hasil Analisis Bappedalitbang 2025

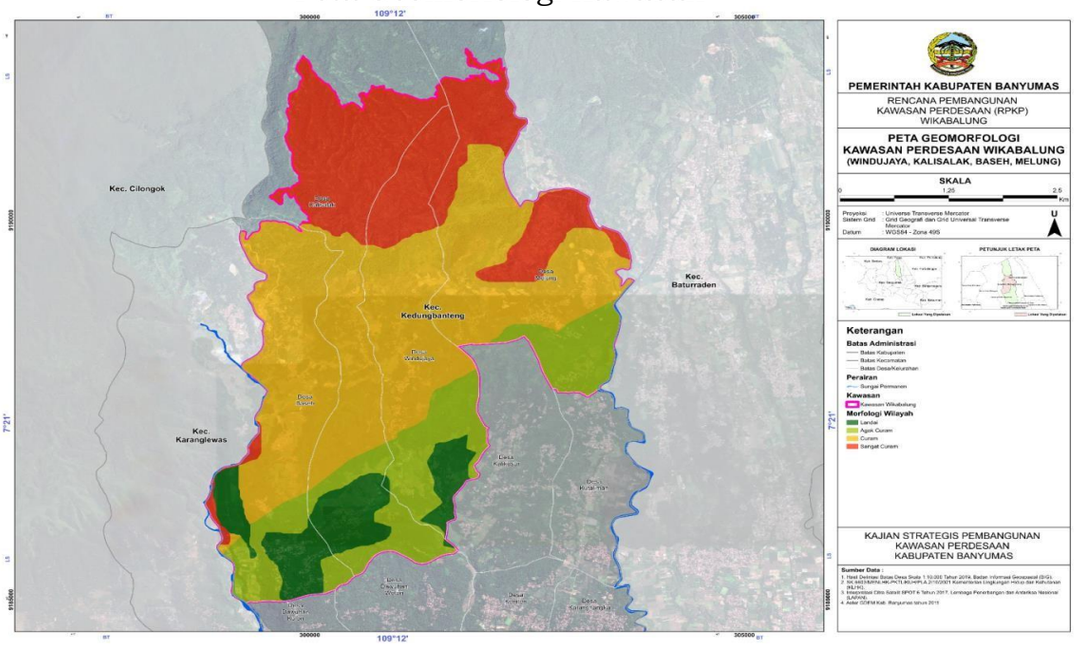
2. Geomorfologi

Kondisi topografi membentuk relief wilayah berdasarkan perbedaan ketinggian absolut. Berdasarkan kondisi topografi, geomorfologi Kawasan Perdesaan Wikabalung terdiri atas perbukitan rendah, perbukitan, dan perbukitan tinggi.

Gambar 2.1
Peta Topografi Kawasan Perdesaan Wikabalung
Kabupaten Banyumas



Gambar 2.2
Peta Geomorfologi Kawasan



3. Geologi

Kawasan Perdesaan Wikabalung dibentuk oleh jenis batuan sebagai berikut:

a. Qvs

Jenis batuan ini merupakan batuan Gunung Api Slamet tak terurai, jenis batuannya breksi gunung api, lava, dan tuff berumur kuarter. Sebarannya membentuk dataran dan perbukitan.

b. Qvls

Jenis batuan ini merupakan batuan yang tersusun terutama oleh lava andesit dengan struktur vesikuler (struktur yang berlubang-lubang karena disebabkan oleh keluarnya gas pada waktu pembekuan magma).

Jenis tanah pada Kawasan Perdesaan Wikabalung meliputi Asosiasi Mediteran Coklat Litosol (Satuan Asosiasi Mediteran Coklat dan Litosol) dan Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol (Satuan Asosiasi Mediteran Kemerahan dan Litosol).

a. Tanah Mediteran

Jenis tanah mediteran masuk dalam ordo alfisol, tanah jenis ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Tanah mediteran merupakan tanah pertanian yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur lainnya.

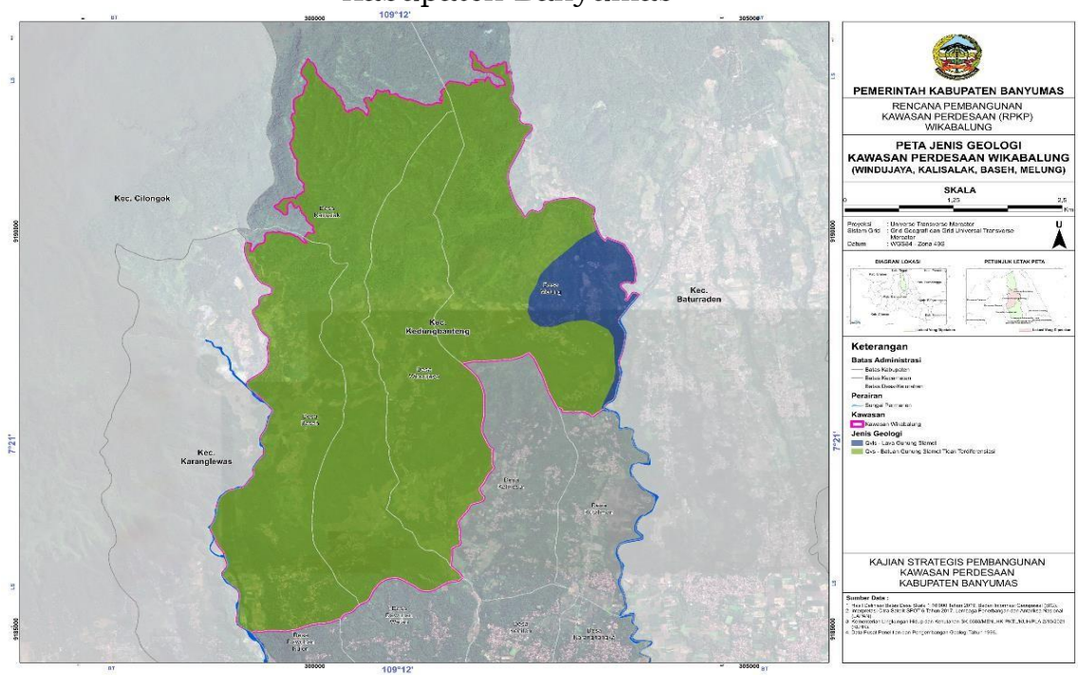
Ciri-ciri dari tanah mediteran adalah warnanya berkisar antara merah sampai kecoklatan dan memiliki karakteristik akumulasi lempung pada horizon Bt (timbunan dari bahan-bahan yang terbawa dari horizon A), horizon E (horizon antara horizon A dan horizon B dan memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan horizon B) yang tipis, mampu menyediakan dan menampung banyak air, dan bersifat asam. Tanah mediteran mempuyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur sehingga permeabilitasnya lambat. Jenis tanah mediteran ini mengandung banyak air, Al, Fe dan bahan organik lain sehingga dapat dikatakan sebagai tanah yang subur yang cocok untuk persawahan.

b. Tanah Litosol

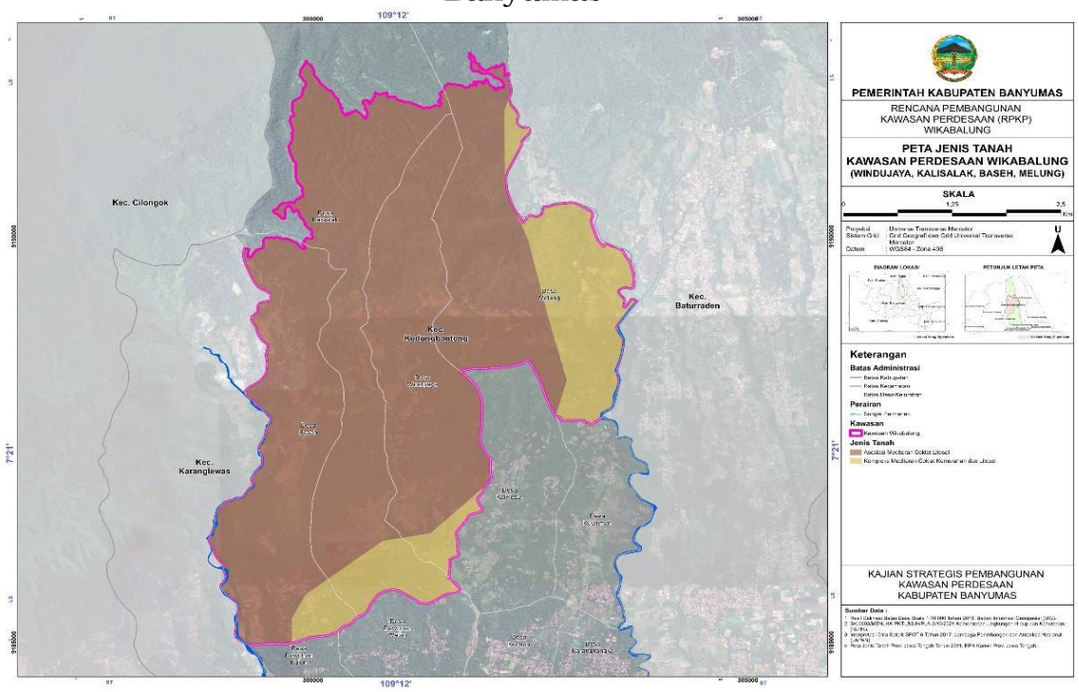
Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO-Unesco) tanah jenis ini bernama Litosol sedangkan menurut USDA tanah jenis ini masuk ordo Entisols, tanah jenis ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah litosol memiliki ciri butiran kasar berupa kerikil. Tanah litosol sangat miskin unsur hara karena merupakan hasil pelapukan yang belum sempurna.

Ciri-ciri dari tanah litosol adalah warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon yang sangat dangkal yaitu kurang dari 50 cm, memiliki tekstur yang lepas, dan kadar bahan organik total (BOT) yang rendah serta tanah litosol sangat peka terhadap erosi. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula serta pada ketinggian berkisar pada 300 - 1000 mdpal. Jenis tanah litosol ini sangat cocok untuk hutan atau ditanami dengan rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.

Gambar 2.3
Peta Jenis Geologi Kawasan Perdesaan Wikabalung
Kabupaten Banyumas



Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Wikabalung Kabupaten Banyumas



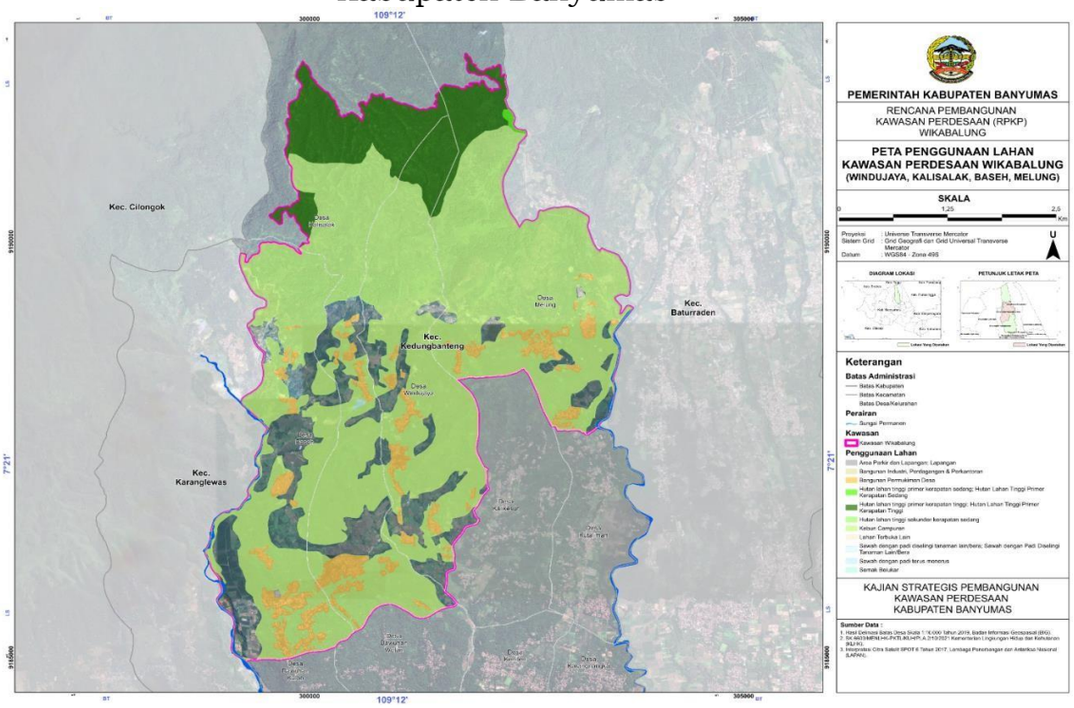
4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada Kawasan perdesaan Wikabalung Kabupaten Banyumas di dominasi dengan Hutan Lahan Tinggi Primer dengan kerapatan tinggi dengan luas 1553,20 Ha.

Tabel 2.2
Luas Area Penggunaan Lahan Pada Kawasan Perdesaan Wikabalung

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	230,60
2	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	1553,20
3	Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	307,51
4	Ladang/Tegalan Palawija	0,07
5	Semak Belukar	1,16
6	Lahan Terbuka Lain	4,59
7	Kebun Campuran	1351,38
8	Bangunan Permukiman Desa	136,50
9	Area Parkir dan Lapangan	0,66
10	Sungai	6,67
	Total	2026,541

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan Wikabalung
Kabupaten Banyumas



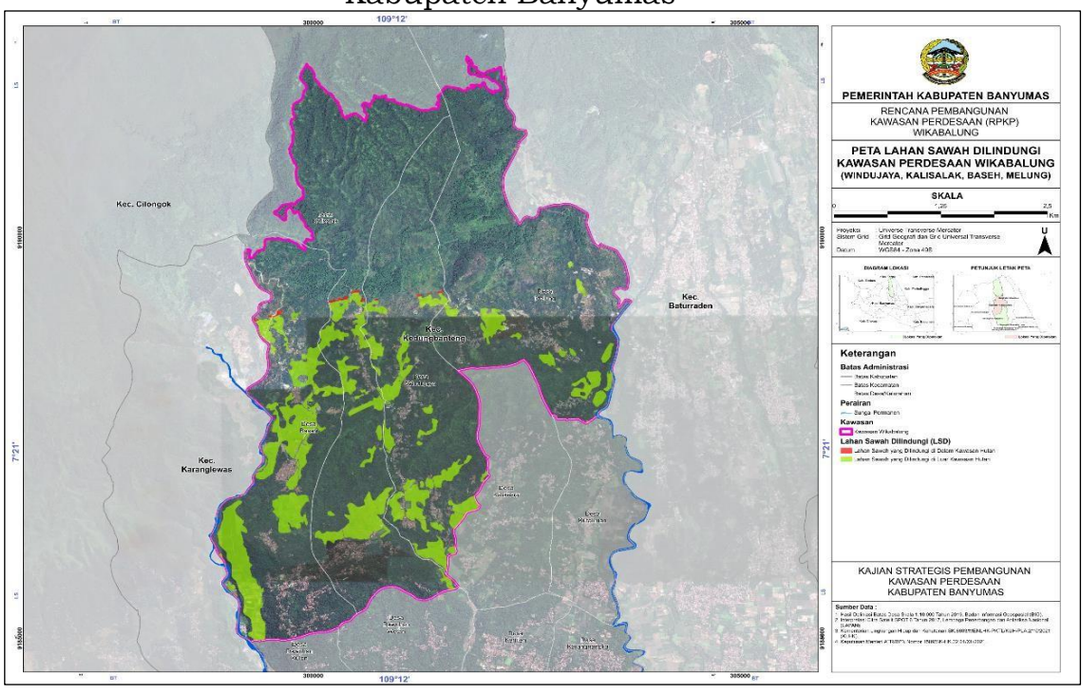
Pada Kawasan Perdesaan Wikabalung masih terdapat sawah dan yang telah diidentifikasi sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Penetapan LSD bertujuan untuk mencegah agar sawah yang produktivitas lahannya tinggi tidak beralih fungsi menjadi penggunaan lahan lain. Identifikasi LSD adalah salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Banyumas. Luas LSD pada Kawasan Perdesaan Wikabalung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah Dilindung

No.	Desa	Luas Sawah	Luas LSD	% LSD terhadap total sawah
1	Windujaya	80.778	63.401	20.618
2	Kalisalak	72.730	55.902	18.179
3	Baseh	124.735	111.552	36.276
4	Melung	29.263	26.291	8.550
		307.506	257.146	83.623

Keberadaan lahan sawah dilindungi menjadi faktor yang membatasi alih fungsi lahan sawah di Kawasan Perdesaan Wikabalung untuk pembangunan fisik. Dengan LSD fungsi pertanian sebagai ciri kawasan perdesaan juga dapat dipertahankan.

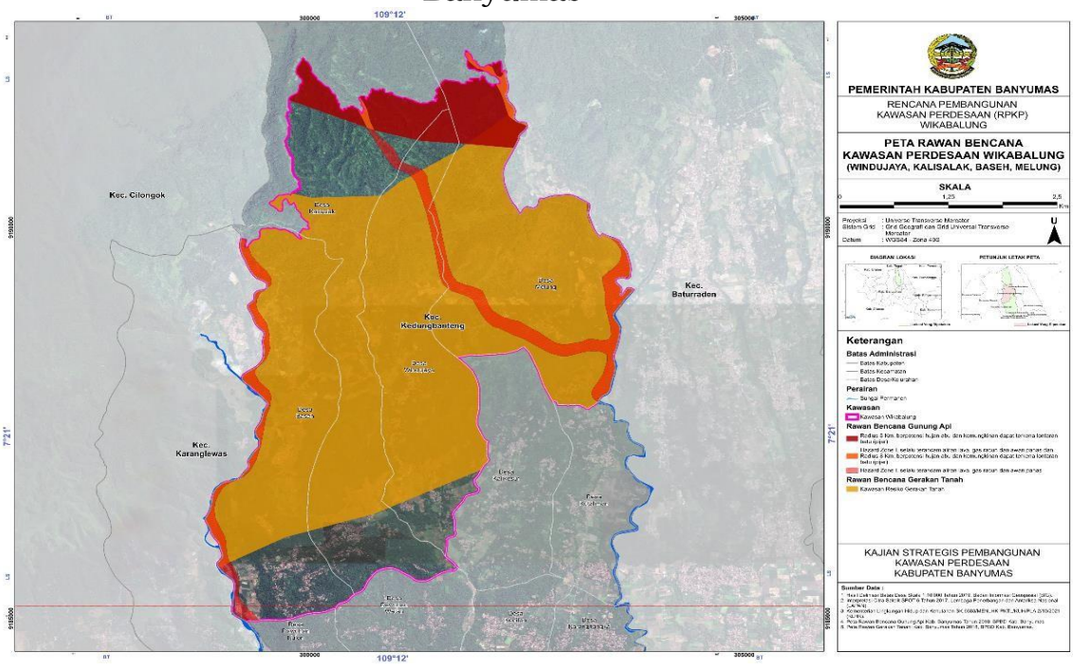
Gambar 2.6
Peta Lahan Sawah Dilindungi Kawasan Perdesaan Wikabalung
Kabupaten Banyumas



5. Kebencanaan

Pada Kawasan Perdesaan Wikabalung dapat diidentifikasi potensi bencana gunung berapi dan rawan gerakan tanah. Potensi tersebut berkaitan dengan lokasi kawasan yang terletak di lereng Gunung Slamet, serta topografi dan ketinggian kawasan yang meningkatkan bahaya gerakan tanah.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Kawasan Perdesaan Wikabalung Kabupaten Banyumas



B. Ekonomi

Potensi desa pada Kawasan Perdesaan Wikabalung untuk dapat dikembangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, dan pariwisata. Pengembangan potensi kawasan difokuskan pada komoditas yang sudah ada dan potensi masing-masing desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Subsektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi, jagung dan ketela pohon. Pada Kawasan Perdesaan Wikabalung Desa Baseh merupakan desa dengan kontribusi tertinggi terhadap produksi padi sawah dengan luas panen sebesar 358 Ha dan produksi sebesar 1.611 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman padi merupakan tanaman dengan potensi tertinggi untuk dikembangkan di daerah tersebut. Selanjutnya dari produktivitas masing-masing desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung memiliki produktivitas yang sama yaitu 45 Kw/Ha di tahun 2025.

Tabel 2.11
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Wikabalung Tahun 2025

Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
Windujaya	194	873,39	45
Kalisalak	155	697,50	45
Baseh	358	1.611,00	45
Melung	156	703,25	45

Banyumas Tabel 2.12
Produksi Tanaman Pertanian Kawasan Wikabalung Tahun 2025

	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ketela Pohon (ton)
Windujaya	873,39	10	50
Kalisalak	697,50	-	60
Baseh	1.611,00	-	120
Melung	703,25	-	55

Pada tahun 2025, sektor pertanian di Kawasan Perdesaan Wikabalung masih didominasi oleh komoditas padi. Desa Baseh menjadi penyumbang produksi padi terbesar dengan capaian 1.611 ton, disusul oleh Windujaya sebesar 873,39 ton, kemudian Melung sebesar 703,25 ton, dan Kalisalak dengan 697,50 ton. Data ini menunjukkan bahwa Baseh memiliki peran penting sebagai sentra produksi padi di kawasan Wikabalung.

Untuk komoditas jagung, hanya Desa Windujaya yang mencatat produksi, yaitu sebanyak 10 ton, sementara desa lainnya tidak memiliki produksi jagung pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa jagung belum menjadi tanaman unggulan di kawasan ini.

Sementara itu, produksi ketela pohon tersebar lebih merata di keempat desa. Desa Baseh kembali mencatat hasil tertinggi dengan 120 ton, diikuti oleh Kalisalak sebanyak 60 ton, Melung sebanyak 55 ton, dan Windujaya sebanyak 50 ton.

Secara keseluruhan, potensi pertanian di kawasan Wikabalung menunjukkan dominasi padi sebagai komoditas utama dengan kontribusi terbesar berasal dari Desa Baseh, sedangkan ketela pohon berperan sebagai komoditas penunjang yang cukup merata di seluruh desa. Adapun jagung masih terbatas dan hanya dihasilkan oleh Desa Windujaya.

2. Peternakan dan Perikanan

Pada Kawasan Perdesaan Wikabalung peternakan dan perikanan masih menggunakan metode konvensional di mana peternak memelihara ternaknya di dalam kandang pada area pekarangan. Jumlah ternak di Kawasan Wikabalung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Populasi Peterrnakan di Kawasan Perdesaan Wikabalung Tahun 2024

Desa	Sapi Potong	Kambing	Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik	Itik Manila
Windujaya	66	311	3462	88964	126	37
Kalisalak	58	350	3246	44482	211	34
Baseh	49	187	6275	44482	211	34
Melung	43	300	387	5667	171	522

Budidaya perikanan terdapat di Desa Windujaya dengan komoditas gurame dan mujair. Kelembagaan petani ikan juga telah terbentuk yaitu Kelompok Budi Daya Ikan Mina Dadi.

3. Pariwisata

Sektor pariwisata yang sedang dikembagkan oleh Bumdes desa Kalisalak yaitu Wisata Ulu-Ulu yang berupa kolam renang dan kolam ikan. Wisata Ulu-Ulu dibangun di atas tanah kas desa. Sementara itu, wisata yang ada di desa Baseh antara lain Kebun buah (milik swasta), baturagung, rest area dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Di Desa Melung, destinasi wisata yang bisa dikunjungi yakni Pegubugan Melung, Pertanian Organik, dan Bukit Agaran.

Untuk menguatkan sektor pariwisata, desa Windujaya telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Bernama SURYA MEKAR yang berjumlah total 12 orang dan diketuai oleh Pak Suwaryo. Pokdarwis pada awalnya dibentuk untuk mengawal pengembangan Bukit Tranggulasih. Sampai saat ini belum ada kegiatan yang terjadwal dengan baik. Kegiatan Pokdarwis hanya menunggu arahan kepala desa. Pokdarwis desa Kalisalak belum dibentuk, namun sudah ada pokja wisata yang menginduk pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Untuk menguatkan sektor pariwisata, desa Melung telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang berjumlah total 40 orang, 25 orang diantaranya bertugas sebagai pengurus, 8 orang dimandatkan untuk mengurus pariwisata secara aktif oleh Kades. Diketuai oleh Budi Ratmiko, POKDARWIS di desa Melung telah aktif dalam kegiatan pembangunan pariwisata di desa melung, dimulai dari penyusunan jadwal kegiatan kerja sampai penyusunan Sapta Pesona.

Pengelolaan dan Sistem Manajemen Wisata di Desa Windujaya dikelola oleh Bumdes. Pengurus Bumdes divisi Pariwisata berjumlah 3 orang. Pengelolaan dan Sistem Manajemen Wisata di Desa Melung dikelola oleh Bumdes. Kades Desa Melung, Bapak Khoirudin mengatakan sistem manajemen kepengurusan Pariwisata oleh Bumdes memiliki kekurangan di aspek pelaporan keuangan, namun Bumdes selalu menjunjung tinggi kejujuran sehingga kepercayaan Kades terhadap Bumdes tetap terjaga.

Tabel 2.18

Jenis Kesenian dan Acara Budaya Kawasan Perdesaan Wikabalung

Desa	Jenis, Kesenian, dan Acara Budaya
Windujaya	lengger, ebeg, karawitan, wayang, dan hadroh
Kalisalak	ebeg, kentongan, hadroh, dan tari gending jawa
Baseh	lengger, kentongan, ebeg,, wayang, dan hadroh
Melung	lengger, ebeg, ruwat bumi 3 tahunan (masyarakat 1 tahunan), suran, mitoni, karawitan, wayang, genjring, dan hadroh

Kesenian dan acara adat di Kawasan Perdesaan Wikabalung dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata.

C. Kependudukan dan Sosial Budaya

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kawasan Perdesaan Wikabalung terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda di tiap desa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk kawasan bertambah dari 10.823 jiwa pada tahun 2020 menjadi 12.938 jiwa pada tahun 2024, atau naik sekitar 19,53% dalam lima tahun terakhir.

Jika dilihat per desa, Windujaya mengalami kenaikan penduduk dari 2.255 jiwa (2020) menjadi 2.776 jiwa (2024). Pertambahan ini cukup stabil setiap tahunnya dengan lonjakan terbesar pada 2022 ketika jumlah penduduk naik lebih dari 300 jiwa. Kalisalak juga menunjukkan tren peningkatan, dari 2.756 jiwa (2020) menjadi 3.251 jiwa (2024), dengan kenaikan cukup pesat pada tahun 2022–2023.

Di sisi lain, Baseh mencatat pertumbuhan paling signifikan, dari 3.682 jiwa (2020) menjadi 4.474 jiwa (2024). Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah penduduk naik lebih dari 600 jiwa hanya dalam satu tahun. Sementara itu, Melung memperlihatkan pola yang sedikit berbeda. Jumlah penduduk naik dari 2.130 jiwa (2020) menjadi 2.454 jiwa (2023), namun pada tahun 2024 justru sedikit menurun menjadi 2.437 jiwa.

Secara umum, data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di seluruh desa, kecuali Melung yang mengalami penurunan kecil pada tahun terakhir. Dengan total penambahan lebih dari 2.100 jiwa selama periode lima tahun, kawasan Wikabalung memiliki dinamika pertumbuhan yang cukup tinggi dan menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan Wikabalung Tahun 2021-2024

Desa	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Windujaya	2255	2266	2568	2717	2776
Kalisalak	2756	2781	2937	3189	3251
Baseh	3682	3711	3739	4406	4474
Melung	2130	2160	2333	2454	2437
	10823	10918	11577	12766	12938

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kawasan Perdesaan Wikabalung selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang cukup berfluktuasi. Secara rata-rata, laju pertumbuhan penduduk kawasan mencapai 3,90% per tahun. Desa dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Windujaya sebesar 4,47%, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebesar 13,33%. Desa Baseh

juga memperlihatkan pola serupa dengan rata-rata 4,34%, terutama karena peningkatan tajam pada tahun 2023 sebesar 17,84%.

Sementara itu, Kalisalak memiliki rata-rata pertumbuhan 3,59%, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 8,58%. Adapun Desa Melung mencatat rata-rata pertumbuhan paling rendah, yaitu 3,09%, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 8,01%, namun mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2024 sebesar -0,69%, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk.

Jika dilihat per tahun, rata-rata pertumbuhan kawasan relatif rendah pada tahun 2020–2021, masing-masing 0,95% dan 0,88%. Peningkatan mulai terasa pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 6,04%, lalu mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 10,27%. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan yang cukup drastis, di mana rata-rata pertumbuhan hanya 1,35%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk di kawasan Wikabalung sangat dipengaruhi oleh lonjakan di desa tertentu pada tahun-tahun tertentu, sementara di sisi lain juga terdapat desa yang mengalami perlambatan bahkan penurunan jumlah penduduk.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Penduduk Kawasan Perdesaan Wikabalung Tahun 2021-2024

Desa	Pertumbuhan Penduduk (%)					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Windujaya	0,54	0,49	13,33	5,80	2,17	4,47
Kalisalak	0,92	0,91	5,61	8,58	1,94	3,59
Baseh	0,80	0,79	0,75	17,84	1,54	4,34
Melung	1,55	1,41	8,01	5,19	-0,69	3,09
Rata-rata	0,95	0,88	6,04	10,27	1,35	3,90

3. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk di Kawasan Perdesaan Wikabalung yang terdiri dari Desa Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung mencapai 12.938 jiwa dengan total luas wilayah 41,54 km². Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk kawasan adalah 311,46 jiwa/km².

Apabila dilihat per desa, Desa Windujaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 889,74 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 2.776 jiwa pada luas wilayah hanya 3,12 km². Selanjutnya, Desa Baseh menempati urutan kedua dengan kepadatan 342,31 jiwa/km² atau 4.474 jiwa di atas luas wilayah 13,07 km². Desa Kalisalak memiliki kepadatan 257,00 jiwa/km², dengan jumlah penduduk 3.251 jiwa di atas luas wilayah 12,65 km². Sementara itu, kepadatan terendah terdapat di Desa Melung dengan 191,89 jiwa/km², dihuni oleh 2.437 jiwa pada wilayah seluas 12,70 km².

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun Windujaya memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dibandingkan Baseh dan Kalisalak, namun keterbatasan luas wilayah membuat

tingkat kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi. Sebaliknya, Desa Melung dengan wilayah yang cukup luas justru memiliki kepadatan terendah. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi distribusi penduduk di kawasan Wikabalung yang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait pemanfaatan ruang, pelayanan dasar, dan pengembangan potensi wilayah.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Wikabalung

Desa	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
Windujaya	3.12	2776	889,74
Kalisalak	12.65	3251	257,00
Baseh	13.07	4474	342,31
Melung	12.7	2437	191,89
Jumlah	41.54	12938	311,46

4. Rasio Jenis Kelamin

Data pada tabel menunjukkan perkembangan rasio jenis kelamin di Kawasan Perdesaan Wikabalung yang terdiri dari Desa Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, rasio jenis kelamin di seluruh desa mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 dan setelahnya cenderung stabil dengan fluktuasi yang relatif kecil.

Desa Windujaya pada tahun 2020 memiliki rasio jenis kelamin sebesar 101,58, kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 107,68, dan sejak itu angkanya relatif stabil hingga mencapai 107,76 pada tahun 2024. Pola yang hampir sama juga terlihat di Desa Kalisalak, di mana pada tahun 2020 rasio jenis kelamin masih berada di bawah 100 yaitu 99,39, lalu naik menjadi 105,73 pada tahun 2021. Meskipun sempat sedikit menurun pada 2023, rasio jenis kelamin kembali meningkat hingga mencapai 105,80 pada tahun 2024.

Desa Baseh menunjukkan kondisi serupa dengan rasio awal 101,40 pada tahun 2020, kemudian melonjak menjadi 107,97 pada tahun 2021. Sejak itu angka rasio tetap berada di kisaran 107 hingga 108, dengan nilai 107,84 pada tahun 2024. Sementara itu, Desa Melung yang pada tahun 2020 memiliki rasio paling rendah yaitu 97,92, juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 104,68 pada tahun 2021. Pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut tetap stabil di kisaran 104, meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun ke angka 104,67.

Tabel 2.8
Rasio Jenis Kelamin Kawasan Perdesaan Wikabalung 2020-2024

No	Desa	Rasio Laki-laki Perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Windujaya	101,58	107,68	107,64	107,70	107,76
2	kalisalak	99,39	105,73	105,82	105,70	105,80
3	Baseh	101,4	107,97	107,79	107,90	107,84
4	Melung	97,92	104,68	104,81	104,74	104,67

5. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 2.9
Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Desa dan Tingkat Pendidikan 2024

Desa	Windujaya	Kalisalak	Baseh	Melung	Jumlah
Tidak/Belum Tamat SD	1044	1170	1906	2667	6787
SD	1205	1357	1673	1810	6045
SLTP	117	235	199	227	778
SLTA	91	66	118	54	329
Akademi/Universitas	10	19	20	13	62
Jumlah	2467	2847	3916	4771	14001

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk usia lima tahun ke atas di Kawasan Perdesaan Wikabalung mencapai 14.001 jiwa. Sebagian besar penduduk masih berpendidikan rendah. Kelompok dengan kategori tidak/belum tamat SD mendominasi, dengan jumlah 6.787 jiwa atau hampir separuh dari total populasi (±48,5%). Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat putus sekolah di tingkat dasar masih relatif tinggi, khususnya di Desa Melung (2.667 jiwa) dan Baseh (1.906 jiwa) yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada kategori ini.

Di sisi lain, penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan dasar (SD) mencapai 6.045 jiwa atau sekitar 43,2% dari total. Desa Melung juga menempati posisi tertinggi dalam kategori ini (1.810 jiwa), disusul Kalisalak (1.357 jiwa), Windujaya (1.205 jiwa), dan Baseh (1.673 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat baru sebatas menuntaskan pendidikan dasar, sehingga akses menuju pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas.

Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan menengah pertama (SLTP) hanya 778 jiwa (5,6%), sedangkan yang menamatkan pendidikan menengah atas (SLTA) lebih sedikit lagi, yaitu 329 jiwa (2,3%). Angka ini memperlihatkan adanya penyempitan partisipasi pendidikan setelah jenjang SD, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendidikan, faktor ekonomi keluarga, serta rendahnya motivasi melanjutkan sekolah.

Sementara itu, penduduk yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi (akademi/universitas) masih sangat terbatas, hanya 62 jiwa (0,4%). Jumlah ini relatif merata di keempat desa, dengan angka tertinggi terdapat di Baseh (20 jiwa) dan terendah di Windujaya (10 jiwa). Kondisi ini menegaskan bahwa akses ke pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar di kawasan perdesaan Wikabalung, baik karena faktor jarak ke pusat pendidikan tinggi maupun keterbatasan biaya.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan masyarakat Kawasan Perdesaan Wikabalung tahun 2024 memperlihatkan piramida pendidikan yang mengerucut tajam: semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah lulusan semakin menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan ini masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya tingkat pendidikan akan berimplikasi pada keterbatasan daya saing masyarakat dalam mengakses pekerjaan formal, mengembangkan usaha produktif, maupun mengelola potensi ekonomi lokal.

Dengan demikian, ke depan perlu ada intervensi kebijakan yang berfokus pada perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan sarana-prasarana pendidikan di wilayah perdesaan. Upaya lain yang juga penting adalah penguatan pendidikan nonformal dan vokasional untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang relevan dengan potensi lokal, seperti pertanian modern, pariwisata, dan UMKM.

6. Jenis Pekerjaan Penduduk

Masyarakat di Kawasan Perdesaan Wikabalung dengan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 sebagian besar bekerja di bidang pertanian, sesuai dengan potensi daerah yang bersifat agraris. Jumlah terbanyak adalah desa Melung sebanyak 1.950 orang, disusul Desa Baseh sebanyak 1.589 orang, Desa Kalisalak sebanyak 1.006 orang dan terakhir desa Windujaya sebanyak 1.102 orang. Jenis Pekerjaan yang paling sedikit di kawasan ini yaitu masyarakat yang bekerja di Lembaga Keuangan.

Tabel 2.10
Pekerjaan Masyarakat Usia 15 Tahun Keatas 2024

Jenis Pekerjaan	Windujaya	Kalisalak	Baseh	Melung
Pertanian	1,102	1,006	1589	1950
Pertambangan	24	2	83	142
Industri	209	385	331	686
Listrik, gas, Air	3	4	9	75
Konstruksi	57	135	233	270
Perdagangan	359	507	699	459
Angkutan & Komunikasi	61	70	68	29
Lembaga Keuangan	8	10	11	5
Jasa-jasa	180	170	237	224
Jumlah	2,003	2,289	3260	3840

Data pada tabel memperlihatkan kondisi tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas di empat desa yang tergabung dalam

Kawasan Perdesaan Wikabalung pada tahun 2024. Secara umum, jumlah penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya kategori tidak atau belum tamat SD serta lulusan SD, mendominasi keseluruhan populasi, sementara kelompok dengan pendidikan menengah dan tinggi relatif masih kecil.

Desa Melung memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 4.771 jiwa, disusul oleh Baseh sebanyak 3.916 jiwa, Kalisalak sebanyak 2.847 jiwa, dan Windujaya sebanyak 2.467 jiwa. Dari sisi tingkat pendidikan, kelompok terbanyak adalah penduduk yang tidak atau belum tamat SD dengan total 6.787 jiwa. Angka ini tersebar paling banyak di Desa Melung sebanyak 2.667 jiwa, kemudian Baseh sebanyak 1.906 jiwa, Kalisalak 1.170 jiwa, dan Windujaya 1.044 jiwa. Selanjutnya, lulusan SD juga cukup tinggi yaitu 6.045 jiwa, di mana jumlah terbesar berada di Melung sebanyak 1.810 jiwa dan yang terendah di Windujaya sebanyak 1.205 jiwa.

Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP tercatat sebanyak 778 jiwa, dengan distribusi terbanyak di Kalisalak (235 jiwa) dan terendah di Windujaya (117 jiwa). Untuk tingkat SLTA jumlahnya lebih kecil lagi, yaitu 329 jiwa, di mana Baseh memiliki jumlah terbanyak dengan 118 jiwa, sedangkan paling sedikit ada di Melung dengan 54 jiwa. Pada tingkat pendidikan tertinggi, yaitu akademi atau universitas, jumlahnya masih sangat terbatas yakni hanya 62 jiwa di seluruh kawasan, dengan persebaran terbesar di Baseh (20 jiwa) dan terendah di Windujaya (10 jiwa).

Secara keseluruhan, dari total 14.001 jiwa penduduk usia 5 tahun ke atas, lebih dari 90 persen masih berada pada tingkat pendidikan rendah, baik tidak tamat SD maupun lulusan SD. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan lanjutan, baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi, masih sangat terbatas di Kawasan Perdesaan Wikabalung, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

D. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Windujaya	Kalisalak	Baseh	Melung	Jumlah
TK	1	1	2	1	5
SD	2	2	2	1	7
SLTP	0	0	1	1	2
SMK	0	0	0	0	0
MI	0	0	0	0	0
MTs	0	0	0	0	0
Jumlah	3	3	5	3	14

Tabel menunjukkan ketersediaan prasarana pendidikan di empat desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Wikabalung, yaitu Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung. Secara keseluruhan terdapat 14 unit lembaga pendidikan yang tersebar di wilayah ini, dengan variasi yang berbeda di tiap desa.

Desa Baseh memiliki jumlah sarana pendidikan terbanyak yaitu lima unit, terdiri atas dua TK, dua SD, dan satu SLTP. Desa Windujaya dan Kalisalak masing-masing memiliki tiga unit sarana

pendidikan, dengan komposisi satu TK dan dua SD. Sementara itu, Desa Melung juga memiliki tiga unit lembaga pendidikan, terdiri dari satu TK, satu SD, dan satu SLTP.

Jika dilihat menurut jenjang, jumlah TK di kawasan ini sebanyak lima unit, yang tersebar di seluruh desa. Sekolah dasar (SD) merupakan sarana pendidikan yang paling merata dengan total tujuh unit, di mana hampir setiap desa memiliki dua SD, kecuali Melung yang hanya memiliki satu. Untuk tingkat pendidikan menengah pertama (SLTP), jumlahnya sangat terbatas yakni hanya dua unit, masing-masing satu di Baseh dan satu di Melung. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah atas, baik SMA maupun SMK, maupun lembaga pendidikan berbasis agama seperti MI dan MTs, belum tersedia di seluruh desa dalam kawasan Wikabalung.

Dari data tersebut terlihat bahwa ketersediaan prasarana pendidikan di Kawasan Perdesaan Wikabalung masih terkonsentrasi pada pendidikan dasar (TK dan SD), sementara untuk jenjang pendidikan menengah ke atas belum terlayani dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas, sehingga kemungkinan besar anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah harus keluar dari desa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang tersebut.

2. Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Kawasan Perdesaan Wikabalung pada tahun 2024 masih sangat terbatas dan lebih banyak bertumpu pada layanan dasar berbasis desa. Setiap desa, yaitu Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung, memiliki satu Poskesdes sebagai sarana kesehatan utama yang ada di tingkat desa. Selain itu, terdapat layanan Posyandu yang jumlahnya bervariasi, dengan total 18 unit di seluruh kawasan. Desa Baseh memiliki jumlah Posyandu terbanyak, yaitu enam unit, sedangkan tiga desa lainnya, yaitu Windujaya, Kalisalak, dan Melung, masing-masing memiliki empat unit.

Namun demikian, pada tingkat layanan kesehatan yang lebih tinggi seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Puskesmas Keliling (Pusling), belum terdapat fasilitas di keempat desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih lengkap masih sangat terbatas, sehingga mereka kemungkinan besar harus menuju desa atau kecamatan lain di luar kawasan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai.

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun layanan dasar kesehatan masyarakat sudah tersedia melalui Poskesdes dan Posyandu, tetapi kebutuhan akan sarana kesehatan tingkat lanjut masih belum terpenuhi. Dengan demikian, penguatan jaringan pelayanan kesehatan serta peningkatan ketersediaan tenaga medis di kawasan perdesaan ini menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2024
Kawasan Perdesaan Wikabalung

Sarana Kesehatan	Windujaya	Kalisalak	Baseh	Melung
Poskesdes	1	1	1	1
Puskesmas	0	0	0	0
Puskesmas Pembantu	0	0	0	0
Pusling	0	0	0	0
Posyandu	4	4	6	4

3. Prasarana Sosial Budaya

Ketersediaan sarana ibadah di Kawasan Perdesaan Wikabalung pada tahun 2024 menunjukkan dominasi tempat ibadah umat Islam, berupa masjid dan musholla, sementara rumah ibadah untuk agama lain seperti gereja, wihara, maupun pura belum tersedia di seluruh desa. Secara keseluruhan terdapat 18 masjid dan 69 musholla yang tersebar di empat desa kawasan ini.

Desa Baseh memiliki jumlah sarana ibadah terbanyak dengan tujuh masjid dan 20 musholla, disusul Desa Kalisalak dengan empat masjid dan 19 musholla, serta Desa Melung dengan tiga masjid dan 16 musholla. Desa Windujaya memiliki jumlah paling sedikit, yaitu empat masjid dan 14 musholla. Distribusi ini menunjukkan bahwa musholla merupakan sarana ibadah yang paling banyak digunakan masyarakat, dengan jumlah hampir empat kali lipat lebih besar dibandingkan masjid.

Kondisi tersebut mencerminkan karakter sosial budaya masyarakat di Kawasan Perdesaan Wikabalung yang homogen dengan mayoritas beragama Islam. Tidak ditemukannya rumah ibadah agama lain mengindikasikan minimnya keragaman agama di kawasan ini, sehingga sarana ibadah masih terkonsentrasi pada fasilitas umat Muslim.

Tabel 2.16
Jumlah Sarana Ibadah Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Wikabalung

Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Wihara/Pura
Windujaya	4	14	0	0
Kalisalak	4	19	0	0
Baseh	7	20	0	0
Melung	3	16	0	0
Jumlah	18	69	0	0

4. Situs Budaya

Situs budaya di Kawasan Perdesaan Wikabalung dapat dilihat di tabel berikut:

Desa	Situs	Jumlah
Windujaya	Batur Seriah, Batur Lurah, dan Batur Bedil.	3
Kalisalak	Igir Tipis dan Bukit Djenar	2
Baseh	Baturagung	1
Melung	Makam Syaikh Azhari, Makam Kyai Melung, Batur Mbah Buyut, Batur Macan, Batur Lumpang, Petilasan Bukit Cendana, dan Petilasan Bukit Agaran	7
Jumlah		13

Situs-situs budaya di Desa Windujaya tersebut dirawat dan dijaga baik dari segi keutuhan dan kebersihannya. Sampai saat ini belum ada pengembangan untuk membangun situs budaya tersebut baik dari sisi infrastruktur maupun promosinya.

Igir Tipis di Desa Kalisalak merupakan suatu bukit yang lokasinya berbatasan dengan desa Baseh dengan lebar puncak hanya kurang lebih setengah meter. Saat ini sedang dibuat akses jalan yang menghubungkan Igir Tipis dengan Bukit Djenar dengan panjang jalan tiga kilometer dan lebar lima meter.

Situs budaya Baturagung di Desa Baseh yang merupakan situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan di Dusun Pondok Lakah. Situs ini berupa punden berundak yang merupakan peninggalan pra sejarah. Luas situs sekitar 10,080 ha, di bagian dalam situs terdapat bangunan pelindung peningalan-peninggalan yang berupa arca dan artefak.

Situs-situs budaya di Desa Melung tersebut dirawat dan dijaga dengan baik oleh pengurus Desa dan kelompok adat sehingga kebersihan dan keutuhan bangunan tetap terjaga. Situs budaya tersebut juga sering menjadi tempat untuk kegiatan oleh kelompok adat. Namun, Petilasan Bukit Agaran kurang terawat karena warga dari dalam dan luar desa jarang yang berkunjung ke situs budaya tersebut.

5. Prasarana Perdagangan

Sarana perdagangan di Kawasan Perdesaan Wikabalung berupa pasar desa/kios desa.

No	Desa	Prasarana Perdagangan	
		Pasar (unit)	Kios (unit)
1	Windujaya	1	5
2	Kalisalak	1	
3	Baseh	1	
4	Melung		3

Selain pasar desa di Desa Baseh telah dibangun Rest Area untuk tempat wisata dan sekaligus area perdagangan. Diharapkan

akan banyak UMKM yang akan mengisi stand yang ada. Dimana UMKM yang ada kebanyakan membuat sriping pisah atau makanan olahan.

Lima kios di Desa Windujaya yang sudah dibangun dan telah ditempati oleh pedagang. Kios tersebut dibangun dan dinamakan Pasar Senen oleh Kepala Desa Windujaya. Pasar Senen berada di dekat Sekolah Dasar, Kantor Desa, Perbatasan antara Kalikesur dan Kalisalak, sampai Gedung Olahraga. Masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat tersebut biasanya menyempatkan waktu untuk mampir ke Pasar Senen.

Di Desa Kalisalak terdapat pasar ikan yang dikelola oleh kelompok petani ikan binaan desa. Pasar ini berperan dalam mengepul ikan dari petani, mendisplay dan memasarkan. Pasar ini masih rintisan sehingga belum terlalu berkontribusi ke desa.

Pasar tradisional Berkah Baseh terletak di pertigaan jalan dekat dengan Balai Desa. Ada beberapa kios yang sudah mulai ramai pembeli. Posisi kios tersebut berdekatan dengan lapangan olahraga desa Baseh sehingga menambah omset penjualan ketika warga berolahraga di lapangan. Terdapat 3 kios di Desa Melung yang sudah dibangun, 1 kios sudah ditempati oleh UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), namun 2 kios masih kosong. Kios tersebut bersebelahan dengan PLTA Ketenger dan Pertanian Organik. Kios yang ditempati oleh UP2K menjual beberapa menu seperti kopi dan berbagai jajanan.

6. Prasarana Pemerintahan

Data menunjukkan bahwa setiap desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung, yaitu Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung, telah memiliki sarana pemerintahan dasar berupa kantor desa dan balai desa masing-masing satu unit. Sarana tersebut menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

Selain itu, terdapat aset desa berupa tanah bengkok dan tanah kas dengan luas yang bervariasi di tiap desa. Desa Melung memiliki tanah bengkok paling luas yaitu 37,07 hektar, sedangkan yang paling sedikit berada di Kalisalak dengan luas 10,44 hektar. Desa Baseh dan Windujaya masing-masing memiliki tanah bengkok seluas 19,42 hektar dan 14,18 hektar. Untuk tanah kas, luasnya relatif kecil dan lebih merata, yaitu berkisar antara 1 hingga 1,4 hektar di tiap desa.

Namun, sarana pendukung lain seperti kantor pos pembantu, koperasi unit desa (KUD), PKK sebagai kelembagaan desa, badan usaha milik desa (Bumdes), maupun wadah kepemudaan seperti karang taruna belum tersedia di keempat desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prasarana pemerintahan dasar sudah terpenuhi, keberadaan sarana dan kelembagaan pendukung yang berfungsi untuk menggerakkan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan organisasi sosial masih sangat terbatas.

Dengan demikian, ketersediaan sarana pemerintahan di kawasan Wikabalung masih didominasi oleh infrastruktur dasar, sementara aspek kelembagaan dan layanan tambahan belum berkembang. Hal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang

bagi penguatan kapasitas desa melalui pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Tabel 2.19
Sarana Pemerintahan Kawasan Perdesaan Wikabalung Tahun 2024

Sarana Pemerintahan	Windujaya	Kalisalak	Baseh	Melung
Kantor Desa	1	1	1	1
Balai Desa	1	1	1	1
Kantor Pos Pembantu	0	0	0	0
Tanah Bengkok	14,18 ha	10,44 ha	19,42 ha	37,07 ha
Tanah Kas	1 ha	1,4 ha	1,4 ha	1 ha
KUD	0	0	0	0
PKK	0	0	0	0
Bumdes	0	0	0	0
Karang Taruna	0	0	0	0

7. Prasarana Olah Raga

Semua desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung sudah memiliki lapangan untuk sarana olahraga masyarakat desanya. Untuk prasarana olahraga sendiri contohnya, di Desa Baseh terdapat 3 lapangan di dusun yang ada. Sedangkan di Desa Windujaya terdapat 1 lapangan desa dan di dusun 2 terdapat 1 lapangan lagi. Hal ini juga bisa dikembangkan untuk membuat salah satu area di daerah Wikabalung tersebut sebagai Gedung Olahraga Serbaguna sehingga para warga desa bisa melakukan aktivitas olahraga dengan baik dan ke depan masyarakat desa di daerah Wikabalung memiliki jasmani yang selalu sehat.

E. Kelembagaan

Kelembagaan di kawasan Wikabalung memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelembagaan yang terdapat di desa-desa kawasan ini umumnya terdiri dari kelompok tani, kelompok sadar wisata, koperasi, serta lembaga ekonomi desa yang mendukung kegiatan usaha dan pengembangan potensi lokal.

Kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani, mengelola hasil pertanian secara kolektif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Melalui kelompok tani, petani dapat memperoleh pendampingan terkait teknik budidaya, pengelolaan pascapanen, serta akses ke permodalan dan pasar yang lebih luas.

Selain kelompok tani, di sektor pariwisata terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata lokal. Pokdarwis bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pariwisata, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta menciptakan inovasi dalam paket wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Keberadaan Pokdarwis menjadi faktor penting dalam keberlanjutan wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang memberdayakan penduduk lokal.

Dalam sektor ekonomi, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa dengan mengelola berbagai usaha yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran produk lokal. BUMDes berperan dalam menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil, membantu pemasaran produk unggulan desa, serta menjadi wadah bagi inovasi ekonomi berbasis komunitas. Keberadaan koperasi dan BUMDes turut mendukung inklusivitas ekonomi masyarakat desa dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, terdapat kelembagaan sosial seperti Karang Taruna dan kelompok perempuan yang turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat desa. Karang Taruna aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi kreatif, sedangkan kelompok perempuan berperan dalam pengolahan produk pangan lokal serta berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya.

Dengan adanya berbagai kelembagaan ini, kawasan Wikabalung memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang. Penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi antar-lembaga, serta dukungan infrastruktur yang memadai akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pembangunan perdesaan berbasis potensi lokal.

F. Perkembangan Desa (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran IDM, desa diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama, dari yang paling rendah (tertinggal) hingga paling tinggi (mandiri). Tabel 2.18 menunjukkan bahwa Desa Windujaya, Desa Kalisalak, dan Desa Baseh termasuk dalam kategori Desa Maju, sedangkan Desa Melung termasuk dalam status Desa Berkembang.

Desa yang berstatus Maju umumnya memiliki infrastruktur yang memadai, pelayanan dasar yang cukup baik, tingkat kemandirian ekonomi masyarakat yang sudah berkembang, serta tata kelola pemerintahan desa yang berjalan dengan baik. Skor Indeks Desa Membangun (IDM) untuk desa pada kategori ini berada dikisaran lebih dari 0,7072 hingga 0,8152. Sementara itu, Desa Berkembang adalah desa yang telah mampu menyediakan sebagian pelayanan dasar bagi masyarakat, memiliki sarana dan prasarana yang cukup, serta mulai menunjukkan adanya aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Namun, tingkat kemandirian dan kualitas tata kelola pemerintahannya masih perlu ditingkatkan. Desa dengan status Berkembang memiliki skor IDM antara 0,5989 hingga 0,7072.

Tabel Indeks Desa Membangun

Desa	Nilai	Status
Windujaya	0,7943	Maju
Kalisalak	0,7365	Maju
Baseh	0,7794	Maju
Melung	0,6979	Berkembang

BAB III
DELIENASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

A. Delineasi Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan Wikabalung mencakup empat desa, yaitu Desa Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung yang berada di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di kaki Gunung Slamet dengan karakteristik utama sebagai daerah berbasis pertanian dan pariwisata alam.

Delineasi kawasan dilakukan berdasarkan berbagai aspek, antara lain aspek administratif, geografis, sosial-ekonomi, dan potensi wilayah. Secara administratif, keempat desa tersebut termasuk dalam satu wilayah kecamatan yang memiliki keterkaitan erat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan. Dari aspek geografis, kawasan ini memiliki topografi perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi, serta kondisi lingkungan yang mendukung sektor pertanian dan ekowisata.

Secara sosial-ekonomi, masyarakat di kawasan Wikabalung mayoritas bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha berbasis pariwisata seperti ekowisata dan agrowisata. Produk unggulan yang berkembang di kawasan ini meliputi kopi, durian, serta pengolahan hasil pertanian lainnya. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, serta akses transportasi yang menghubungkan antar desa menjadi faktor penting dalam menentukan batas kawasan.

Dengan delineasi yang jelas, pengembangan kawasan perdesaan Wikabalung akan lebih terarah dan sinergis dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Potensi Produk Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan Wikabalung memiliki berbagai produk potensial yang berasal dari sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga. Produk-produk ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sektor pertanian di kawasan ini didominasi oleh komoditas unggulan seperti kopi, kapulaga, jagung, cengkeh, dan durian. Kopi merupakan salah satu produk andalan dengan luas tanam mencapai 46 hektar dan luas panen sekitar 34 hektar, dengan produktivitas mencapai 900 kg per hektar. Kualitas kopi yang dihasilkan memiliki cita rasa khas karena ditanam di dataran tinggi dengan kondisi tanah yang subur. Selain itu, kapulaga juga menjadi komoditas penting dengan luas tanam 20 hektar dan produktivitas mencapai 1.200 kg per hektar. Komoditas ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri farmasi dan kuliner, menjadikannya sebagai peluang usaha yang menjanjikan bagi petani setempat. Selain kopi dan kapulaga, pertanian di kawasan ini juga menghasilkan jagung, cengkeh, dan durian yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik di tingkat lokal maupun regional.

Di sektor pariwisata, kawasan Wikabalung memiliki beragam destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan dan keunikan tersendiri. Beberapa destinasi yang terkenal di antaranya adalah Curug Gomblang, Curug Lima, dan Curug Kembar yang menyajikan pesona air terjun dengan suasana yang masih alami dan asri. Selain itu, terdapat Gunung Jenar dan Puncak Dinar yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang gemar mendaki dan menikmati

panorama alam dari ketinggian. Tak hanya itu, Pagubugan Melung, Watu Blencong, dan Watu Tumpeng menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan lanskap perbukitan dengan berbagai aktivitas ekowisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Industri rumah tangga di kawasan ini juga memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Berbagai produk olahan lokal telah dikenal luas, seperti peyek, emping, kopi kemasan, keripik pisang, tempe mendoan, dan tempe papan. Peyek dan emping merupakan camilan tradisional yang banyak diminati oleh pasar lokal maupun wisatawan. Kopi kemasan yang dihasilkan oleh petani setempat memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui branding dan pemasaran digital. Sementara itu, keripik pisang, tempe mendoan, dan tempe papan menjadi produk olahan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai oleh-oleh khas dari kawasan Wikabalung.

Dengan beragam potensi yang dimiliki, kawasan Wikabalung memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat ekonomi berbasis lokal yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta strategi pemasaran yang lebih modern menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing kawasan ini. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan inovatif, potensi yang ada dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta meningkatkan daya tarik kawasan perdesaan Wikabalung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

A. Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung

Dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan Wikabalung, ditetapkan dua klaster utama dalam pemilihan produk unggulan, yaitu klaster pertanian dan klaster wisata. Produk unggulan yang dipilih dalam klaster pertanian adalah kopi dan kapulaga, sedangkan klaster wisata akan berfokus pada pengintegrasian berbagai destinasi wisata di kawasan ini. Selain itu, produk pendukung berupa produk industri rumah tangga juga akan dikembangkan untuk mendukung sektor utama.

Pada klaster pertanian, kopi dan kapulaga dipilih sebagai produk unggulan klaster pertanian berdasarkan beberapa faktor strategis. Kedua komoditas ini memiliki potensi yang sangat baik di kawasan Wikabalung, baik dari segi luas lahan maupun tingkat produktivitasnya. Wilayah ini memiliki kondisi agroklimat yang mendukung pertumbuhan kopi dan kapulaga dengan kualitas tinggi, yang menjadi nilai tambah dalam pengembangannya.

Selain itu, desa-desa di kawasan Wikabalung memiliki hak kelola perhutanan sosial yang terletak di kaki Gunung Slamet. Hal ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menanam kopi dan kapulaga sebagai tanaman sela di area perhutanan sosial, sehingga dapat meningkatkan hasil panen tanpa mengganggu kelestarian hutan. Dengan pemanfaatan perhutanan sosial ini, masyarakat dapat mengoptimalkan lahan yang tersedia secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui hasil pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.

Pada klaster pariwisata, strategi pengembangan yang diusung adalah integrasi destinasi wisata yang ada di Wikabalung guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Melalui konsep paket wisata, seluruh destinasi akan dikelola dalam satu sistem yang terpadu sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman yang lebih lengkap dan menarik.

Pengelolaan wisata ini tetap akan melibatkan pihak-pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Selain itu, untuk mendukung produk unggulan dan sektor wisata, dikembangkan juga berbagai produk industri rumah tangga sebagai produk pendukung. Produk-produk ini mencakup kopi kemasan, peyek, emping, jenang ketan, dan tempe mendoan. Produk-produk ini dipilih karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan dapat menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan yang berkunjung ke Wikabalung.

Strategi pemasaran produk pendukung ini akan difokuskan di lokasi-lokasi wisata yang ada di Wikabalung. Dengan harga yang bersahabat, produk-produk tersebut diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk membeli dan membawanya sebagai oleh-oleh. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata kawasan tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi industri rumah tangga lokal.

B. Tujuan dan Sasaran Klaster

Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung yaitu mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan

ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa sehingga terwujud kawasan agrowisata yang menyejahterakan seluruh masyarakat di kawasan perdesaan.

Sasaran

C. Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung

1. Identifikasi Komoditas Unggulan

Berdasarkan potensi sumber daya alam dan hasil identifikasi lapangan, komoditas kopi dan kapulaga menjadi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang berada di kaki Gunung Slamet (misalnya Desa Windujaya, Baseh, Melung, dan Kalisalak).

2. Peta Sebaran dan Skala Usaha

Selain tanaman pangan, Kawasan Perdesaan Wikabalung juga memiliki komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berupa kopi dan kapulaga. Kedua komoditas ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, tetapi juga berpotensi sebagai produk unggulan kawasan.

Komoditas kopi tersebar di Desa Baseh dan Melung, dengan luas lahan mencapai sekitar 120 hektare. Produksi kopi diperkirakan mencapai 80 ton per tahun. Sistem budidaya yang diterapkan umumnya menggunakan pola agroforestri yang memadukan tanaman kopi dengan tegakan hutan maupun kebun campuran. Pola ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan di kawasan kaki Gunung Slamet.

Sementara itu, komoditas kapulaga banyak dijumpai di Desa Windujaya dan Baseh, dengan luas lahan sekitar 60 hektare dan produksi mencapai 20 ton per tahun. Pola usahatani kapulaga umumnya dilakukan melalui sistem tumpangsari dengan tanaman lain, atau ditanam di pekarangan rumah warga. Hal ini membuat kapulaga lebih fleksibel dalam budidaya karena dapat memanfaatkan lahan sempit tanpa mengganggu tanaman utama.

Dengan karakteristik tersebut, kopi dan kapulaga memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kopi dapat diarahkan sebagai komoditas unggulan berbasis perkebunan rakyat dengan dukungan agrowisata, sedangkan kapulaga dapat dikembangkan melalui penguatan usaha kecil berbasis rumah tangga yang memiliki nilai tambah di sektor hilir.

Komoditas	Sebaran Desa	Luas Lahan (Ha)	Produksi per Tahun	Pola Usaha Tani
Kopi	Baseh, Melung	±120	±80 ton	Agroforestri, kebun
Kapulaga	Windujaya, Baseh	±60	±20 ton	Tumpangsari, pekarangan

3. Analisis Klaster (Pendekatan Porter's Diamond)

Faktor	Kopi	Kapulaga
Kondisi	Lahan di ketinggian 800–1.200 mdpl, iklim cocok	Tanah lembab, cocok sebagai tanaman sela
Permintaan	Permintaan tinggi domestik dan ekspor	Permintaan tinggi untuk industri herbal dan ekspor
Usaha Terkait dan Usaha Pendukung	Kelompok tani kopi, koperasi petani, pengolah kopi lokal	Belum banyak industri pendukung, potensi berkembang

Strategi dan Struktur	Terdapat inisiatif kelembagaan tani dan kemitraan UMKM	Masih individual, perlu penguatan kelembagaan petani
Peran Pemerintah	Dukungan dari Bappedalitbang, Dinas Pertanian	Perlu intervensi lebih lanjut dalam hal pelatihan dan bibit

Data menunjukkan bahwa setiap desa di Kawasan Perdesaan Wikabalung, yaitu Windujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung, telah memiliki sarana pemerintahan dasar berupa kantor desa dan balai desa masing-masing satu unit. Sarana tersebut menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

Selain itu, terdapat aset desa berupa tanah bengkok dan tanah kas dengan luas yang bervariasi di tiap desa. Desa Melung memiliki tanah bengkok paling luas yaitu 37,07 hektar, sedangkan yang paling sedikit berada di Kalisalak dengan luas 10,44 hektar. Desa Baseh dan Windujaya masing-masing memiliki tanah bengkok seluas 19,42 hektar dan 14,18 hektar. Untuk tanah kas, luasnya relatif kecil dan lebih merata, yaitu berkisar antara 1 hingga 1,4 hektar di tiap desa.

Namun, sarana pendukung lain seperti kantor pos pembantu, koperasi unit desa (KUD), PKK sebagai kelembagaan desa, badan usaha milik desa (Bumdes), maupun wadah kepemudaan seperti karang taruna belum tersedia di keempat desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prasarana pemerintahan dasar sudah terpenuhi, keberadaan sarana dan kelembagaan pendukung yang berfungsi untuk menggerakkan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan organisasi sosial masih sangat terbatas.

Dengan demikian, ketersediaan sarana pemerintahan di kawasan Wikabalung masih didominasi oleh infrastruktur dasar, sementara aspek kelembagaan dan layanan tambahan belum berkembang. Hal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penguatan kapasitas desa melalui pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

4. Tantangan dan Permasalahan

Aspek	Kopi	Kapulaga
Produksi	Belum optimal, masih tergantung musim	Produktivitas rendah, teknik budidaya kurang
Pengolahan	Minim pengolahan pascapanen	Tidak ada unit pengolahan
Pemasaran	Harga fluktuatif, akses pasar belum stabil	Pemasaran tergantung tengkulak
Kelembagaan	Koperasi belum optimal	Belum terbentuk kelembagaan petani

Tabel tersebut menggambarkan tantangan serta permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan dua komoditas potensial di Kawasan Perdesaan Wikabalung, yaitu kopi dan kapulaga. Dari sisi produksi, kopi masih belum dikelola secara optimal karena sangat bergantung pada kondisi musim, sementara kapulaga menghadapi masalah produktivitas rendah yang diperparah dengan teknik budidaya yang masih sederhana.

Pada aspek pengolahan, kopi umumnya hanya dipasarkan dalam bentuk hasil panen mentah dengan minim pengolahan pascapanen, sehingga nilai tambahnya masih rendah. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada kapulaga, karena hingga saat ini belum tersedia unit pengolahan sama sekali, sehingga komoditas ini hanya dijual dalam bentuk bahan baku tanpa pengolahan lebih lanjut.

Permasalahan serupa juga terlihat pada aspek pemasaran. Harga kopi sangat fluktuatif dan akses pasar yang dimiliki petani belum stabil, sehingga seringkali merugikan petani. Kapulaga pun menghadapi kendala yang tidak kalah berat, karena sistem pemasarannya masih sangat bergantung pada tengkulak, yang membuat posisi tawar petani menjadi lemah.

Dari sisi kelembagaan, kopi sebenarnya telah memiliki wadah koperasi, namun perannya belum berjalan optimal dalam mendukung produksi, pengolahan, maupun pemasaran. Sementara itu, untuk kapulaga hingga kini belum terbentuk kelembagaan petani yang dapat menjadi sarana penguatan kapasitas kolektif.

Secara keseluruhan, permasalahan kopi dan kapulaga di kawasan ini berakar pada keterbatasan produksi, minimnya pengolahan, lemahnya akses pasar, dan ketiadaan kelembagaan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kedua komoditas masih memerlukan intervensi yang menyeluruh, mulai dari perbaikan teknik budidaya, penyediaan unit pengolahan, penguatan kelembagaan petani, hingga perluasan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan.

5. Strategi Pengembangan Klaster

a. Kopi

Pengembangan klaster kopi di Kawasan Perdesaan Wikabalung diarahkan untuk memperkuat posisi kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Strategi ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi di tingkat hulu, tetapi juga pada penguatan nilai tambah di sektor hilir serta pemanfaatan potensi wisata.

Pertama, melalui hilirisasi produk, petani dan pelaku usaha kopi perlu mendapatkan dukungan berupa pelatihan roasting, pengemasan (packaging), dan branding produk. Upaya ini bertujuan agar kopi tidak hanya dijual dalam bentuk biji mentah, tetapi dapat dipasarkan sebagai produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi.

Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan koperasi yang berfungsi sebagai wadah integrasi dari hulu ke hilir. Dengan koperasi yang kuat, petani dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, peralatan, hingga pasar. Selain itu, koperasi juga berperan penting dalam menjaga kualitas produksi dan konsistensi pasokan.

Ketiga, potensi kopi juga dapat dikembangkan melalui wisata agro, yaitu pengembangan wisata kebun kopi. Konsep ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan citra kopi lokal sebagai produk yang khas dari kawasan kaki Gunung Slamet.

Dengan strategi ini, klaster kopi diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan, meningkatkan pendapatan petani, memperluas akses pasar, dan memperkuat identitas daerah sebagai sentra kopi.

b. Kapulaga:

Kapulaga merupakan salah satu komoditas unggulan di Kawasan Perdesaan Wikabalung yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik sebagai tanaman obat maupun bahan baku industri. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, pengembangan klaster kapulaga diarahkan melalui tiga strategi utama.

Pertama, dilakukan pelatihan budidaya modern bagi petani, meliputi pengaturan jarak tanam yang ideal, penggunaan pemupukan organik, serta teknik perawatan yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, produktivitas kapulaga dapat meningkat sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Kedua, diperlukan kemitraan pemasaran dengan industri herbal dan farmasi. Melalui kerja sama ini, hasil panen kapulaga tidak hanya

dipasarkan di tingkat lokal, tetapi juga dapat masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk industri pengolahan obat tradisional, jamu, maupun produk kesehatan modern.

Ketiga, strategi penting lainnya adalah diversifikasi produk melalui pengolahan minyak atsiri kapulaga. Dengan teknologi penyulingan sederhana hingga skala industri kecil, kapulaga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang diminati pasar domestik maupun ekspor.

Melalui strategi ini, klaster kapulaga diharapkan mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat, memperkuat basis ekonomi rumah tangga, dan berkontribusi pada daya saing pertanian kawasan.

6. Rekomendasi Program Prioritas

No	Program	Output
1	Sekolah lapang petani kopi dan kapulaga	Peningkatan kapasitas budidaya dan pascapanen
2	Bantuan alat pascapanen	Mesin sortasi, pengering, dan pengemas sederhana
3	Pemetaan dan sertifikasi lahan komoditas	Kejelasan legalitas dan promosi lahan potensial
4	Festival Komoditas Lokal (Coffee & Spice Fair)	Pemasaran, promosi pariwisata, dan jejaring usaha

Upaya pengembangan komoditas kopi dan kapulaga di Kawasan Perdesaan Wikabalung memerlukan program-program prioritas yang mampu menjawab tantangan utama yang dihadapi petani, mulai dari aspek produksi, pengolahan, pemasaran, hingga kelembagaan. Program pertama yang direkomendasikan adalah sekolah lapang bagi petani kopi dan kapulaga. Melalui program ini diharapkan kapasitas petani meningkat, baik dalam teknik budidaya yang lebih produktif maupun dalam pengelolaan pascapanen yang lebih bernilai tambah.

Program kedua adalah bantuan alat pascapanen, khususnya mesin sortasi, pengering, dan pengemas sederhana. Ketersediaan alat ini akan membantu petani dalam menjaga kualitas produk serta memperpanjang daya simpan, sehingga dapat meningkatkan harga jual. Selanjutnya, program ketiga adalah pemetaan dan sertifikasi lahan komoditas, yang bertujuan memberikan kejelasan legalitas lahan sekaligus mempromosikan potensi lahan kopi dan kapulaga yang ada. Legalitas lahan yang jelas akan memperkuat posisi petani dalam pengembangan usaha dan membuka peluang investasi.

Program keempat adalah Festival Komoditas Lokal (Coffee & Spice Fair) yang tidak hanya berfungsi sebagai media promosi dan pemasaran produk, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan jejaring usaha serta mendukung promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus meningkatkan daya tarik bagi konsumen maupun investor.

Dengan implementasi keempat program prioritas ini, diharapkan pengembangan kopi dan kapulaga di Kawasan Perdesaan Wikabalung dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat perdesaan.

Desa	Potensi Wisata Utama	Karakteristik
Windujaya	Curug Penganten, wisata religi	Alam – religi – edukasi budaya
Kalisalak	Jalur pendakian Gunung Slamet, kebun teh	Ekowisata – petualangan
Baseh	Curug Lawang, hutan pinus	Wisata alam – camping ground – pemandangan
Melung	Embung, wisata edukasi pertanian	Eduwisata – pertanian berkelanjutan

2. Analisis Klaster (Porter's Diamond)

Kawasan Perdesaan Wikabalung memiliki sejumlah faktor pendukung yang dapat menjadi modal dalam pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Dari sisi *factor conditions*, wilayah ini ditandai oleh topografi perbukitan yang indah, keberadaan air terjun, dan hutan pinus yang masih terjaga, serta budaya lokal masyarakat yang relatif kuat. Kondisi ini memberikan daya tarik alam dan sosial budaya yang khas untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata perdesaan.

Pada *demand conditions*, terdapat tren peningkatan kunjungan wisatawan lokal, terutama dari kalangan keluarga, pelajar, dan komunitas pecinta kegiatan alam seperti hiking. Permintaan yang terus tumbuh ini menunjukkan adanya pasar potensial bagi pengembangan ekowisata dan wisata berbasis pendidikan maupun keluarga.

Dari sisi *related industries*, kawasan ini telah memiliki dukungan sektor penunjang seperti UMKM lokal yang memproduksi oleh-oleh dan kuliner khas, homestay sederhana yang dikelola masyarakat, serta adanya komunitas pecinta alam. Kehadiran industri pendukung ini menjadi nilai tambah karena dapat memperkuat rantai ekonomi lokal dan memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi wisatawan.

Namun, pada aspek *firm structure and rivalry*, pengelolaan destinasi wisata saat ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing desa melalui pemerintah desa, karang taruna, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Belum adanya integrasi antar desa membuat potensi kawasan belum tergarap secara maksimal, dan daya saing antarunit pengelola masih terbatas.

Sementara itu, dari segi government role, meskipun sudah ada dukungan dari Dinas Pariwisata dan Bappedalitbang, namun intervensi yang diberikan belum bersifat masif dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah yang lebih strategis, baik dalam hal fasilitasi kelembagaan, promosi kawasan, maupun peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata.

Secara keseluruhan, kelima aspek tersebut menggambarkan bahwa kawasan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi kelembagaan, sinergi antarindustri pendukung, dan dukungan pemerintah yang lebih intensif agar mampu berkembang menjadi destinasi unggulan.

Aspek	Penjelasan
Factor Conditions	Topografi perbukitan, air terjun, hutan pinus, budaya lokal masih kuat
Demand Conditions	Wisatawan lokal meningkat (keluarga, pelajar, komunitas hiking)

Aspek	Penjelasan
Related Industries	UMKM lokal (oleh-oleh, kuliner), homestay sederhana, komunitas pecinta alam
Firm Structure & Rivalry	Dikelola desa, karang taruna, dan LMDH; belum terintegrasi antar desa
Government Role	Sudah ada dukungan Dinas Pariwisata dan Bappedalitbang, namun belum masif

3. Permasalahan Utama

Permasalahan utama Kawasan Perdesaan Wikabalung di antaranya kurangnya promosi dan branding kawasan wisata Wikabalung secara terpadu, aksesibilitas jalan belum maksimal (beberapa lokasi masih susah dijangkau), keterbatasan SDM dan kelembagaan pengelola wisata, belum ada paket wisata terpadu antar desa, dan sarana-prasarana dasar wisata masih terbatas.

Pengembangan kawasan wisata Wikabalung hingga saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan. Salah satu kendala utama adalah minimnya promosi dan branding kawasan secara terpadu. Selama ini promosi wisata lebih banyak dilakukan secara parsial oleh masing-masing desa atau komunitas, sehingga kawasan Wikabalung belum memiliki identitas destinasi yang kuat dan belum dikenal luas oleh wisatawan di luar daerah. Ketiadaan strategi branding yang konsisten juga membuat potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki belum mampu menarik perhatian investor maupun pelaku usaha pariwisata.

Permasalahan berikutnya terkait dengan aksesibilitas jalan yang belum maksimal. Beberapa lokasi wisata masih sulit dijangkau akibat kondisi jalan yang sempit, rusak, atau belum beraspal. Hambatan infrastruktur ini mengurangi kenyamanan wisatawan dan membatasi peluang pengembangan paket perjalanan wisata, terutama bagi wisatawan keluarga maupun kelompok besar.

Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola wisata. Pengelolaan destinasi sebagian besar masih dilakukan oleh desa, karang taruna, atau kelompok masyarakat hutan dengan kapasitas yang terbatas. Belum ada manajemen terpadu antar desa yang mampu merancang program, mengelola fasilitas, maupun mengembangkan inovasi layanan wisata secara profesional. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik swasta, komunitas, maupun lembaga pendidikan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya paket wisata terpadu antar desa. Padahal, potensi alam, budaya, dan ekonomi lokal di setiap desa saling melengkapi. Ketiadaan paket terpadu menyebabkan wisatawan cenderung hanya berkunjung ke satu lokasi tertentu tanpa menjelajahi seluruh kawasan, sehingga lama tinggal (length of stay) dan belanja wisatawan masih sangat rendah.

Terakhir, sarana dan prasarana dasar wisata masih minim. Ketersediaan fasilitas seperti tempat parkir, toilet umum, papan informasi, jalur trekking yang aman, serta penunjang kenyamanan wisatawan lainnya belum memadai. Hal ini membuat pengalaman wisatawan kurang optimal dan dapat mengurangi minat kunjungan ulang.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata Wikabalung masih berada pada tahap awal dan memerlukan strategi intervensi yang terintegrasi. Penguatan promosi dan branding, perbaikan infrastruktur akses, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan paket wisata terpadu, serta pembangunan sarana-

prasarana dasar menjadi kunci untuk mendorong kawasan ini berkembang sebagai destinasi unggulan berbasis potensi lokal.

4. Visi Pengembangan
   "Wikabalung sebagai kawasan wisata alam dan edukasi berbasis komunitas di kaki Gunung Slamet."

5. Strategi Klaster Wisata Wikabalung
   a. Branding kawasan: Pengembangan identitas visual dan promosi digital.
      Strategi branding kawasan diarahkan untuk membangun identitas tunggal Kawasan Perdesaan Wikabalung sebagai destinasi wisata alam–edukatif–budaya di kaki Gunung Slamet. Branding tidak hanya berupa logo dan slogan, tetapi mencakup narasi besar (*storytelling* kawasan) yang mengangkat karakter pertanian pegunungan, kearifan lokal desa, serta nilai konservasi alam.
      Implementasi branding dilakukan melalui pengembangan identitas visual terpadu (logo kawasan, warna, tipografi, *signage*) yang diterapkan secara konsisten pada media promosi, papan informasi, media sosial, hingga produk UMKM wisata. Promosi digital difokuskan pada pemanfaatan media sosial, website kawasan, dan platform wisata untuk menjangkau wisatawan regional maupun nasional, dengan konten visual dan video pendek yang menonjolkan pengalaman (*experience-based tourism*), bukan sekadar lokasi.
   b. Jejaring desa wisata: Integrasi paket wisata lintas desa.
      Pengembangan wisata Wikabalung tidak dilakukan secara parsial per desa, melainkan melalui jejaring desa wisata terpadu yang saling melengkapi. Setiap desa dikembangkan sesuai keunikan dan keunggulan lokal, kemudian diintegrasikan dalam satu sistem paket wisata lintas desa.
      Integrasi ini diwujudkan dalam penyusunan paket wisata tematik terhubung, seperti paket satu hari, dua hari satu malam, atau wisata edukasi kelompok yang mengombinasikan atraksi alam, pertanian, budaya, dan kuliner dari beberapa desa sekaligus. Dengan pendekatan jejaring, arus kunjungan wisata dapat tersebar merata, mencegah ketimpangan antar desa, serta mendorong kolaborasi antar Pokdarwis, BUM Desa, dan pelaku UMKM lokal.
   c. Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan guide, hospitality, digital marketing.
      Keberlanjutan klaster wisata sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Oleh karena itu, strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai pelaku utama pariwisata, khususnya anggota Pokdarwis, pengelola homestay, pelaku UMKM, dan pemuda desa.
      Program peningkatan kapasitas meliputi pelatihan pemandu wisata (*local guide*), pelayanan dan keramahtamahan (*hospitality*), pengelolaan homestay, keamanan wisata, serta digital marketing dan pengelolaan konten promosi. Pelatihan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan pendekatan praktik langsung, sehingga SDM desa mampu memberikan pengalaman wisata yang profesional, ramah, dan berdaya saing.
   d. Perbaikan akses dan infrastruktur dasar: jalan, toilet, tempat sampah, papan informasi.
      Kenyamanan dan keselamatan wisatawan menjadi prasyarat utama dalam pengembangan kawasan wisata. Oleh karena itu, strategi ini menekankan pada perbaikan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur

dasar yang mendukung aktivitas wisata di seluruh desa kawasan Wikabalung.

Prioritas perbaikan meliputi peningkatan kualitas akses jalan menuju dan antar objek wisata, penyediaan toilet umum yang layak dan higienis, tempat sampah terpilah, area parkir sederhana, serta papan informasi dan petunjuk arah yang informatif. Infrastruktur dirancang dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, selaras dengan karakter kawasan pegunungan dan konservasi alam.

e. Pengembangan produk wisata tematik: agroeduwisata, camping, budaya, religi.

Pengembangan produk wisata diarahkan pada penciptaan wisata tematik berbasis potensi lokal yang memberikan nilai edukasi, pengalaman, dan diferensiasi dibandingkan destinasi lain. Produk wisata tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga pada pembelajaran dan pelestarian budaya serta lingkungan.

Tema wisata yang dikembangkan meliputi agroeduwisata (kopi, pertanian organik, peternakan rakyat), wisata alam dan camping (tracking, camping ground, wisata hutan), wisata budaya (kesenian, tradisi desa, kuliner lokal), serta wisata religi dan sejarah lokal. Setiap tema dirancang memiliki alur kunjungan, aktivitas interaktif, dan narasi yang kuat, sehingga mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan (length of stay) dan meningkatkan dampak ekonomi lokal.

D. Analisis Skala Prioritas Kegiatan

Analisis skala prioritas kegiatan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Wikabalung disusun sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya, baik anggaran, waktu, maupun kapasitas kelembagaan, dapat diarahkan secara optimal pada kegiatan yang memberikan dampak paling signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan kawasan. Penetapan skala prioritas dilakukan secara terukur, rasional, dan berbasis kebutuhan riil kawasan, bukan semata-mata pada pemerataan program.

Penentuan prioritas kegiatan mempertimbangkan beberapa aspek utama, antara lain tingkat urgensi permasalahan, besarnya manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan, kesiapan lokasi dan pelaksana, keterkaitan antar sektor dan desa, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional. Kegiatan yang mampu menjadi pengungkit (leverage) bagi berkembangnya sektor lain dan memperkuat konektivitas antar desa ditempatkan sebagai prioritas utama.

Dalam konteks Kawasan Perdesaan Wikabalung, skala prioritas diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fundamental dan enabling, yaitu kegiatan yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi kawasan, khususnya pengembangan klaster pertanian unggulan dan klaster wisata. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan aksesibilitas, infrastruktur dasar, serta kapasitas SDM lokal menjadi fokus awal sebelum pengembangan produk bernilai tambah yang lebih kompleks.

Analisis skala prioritas juga memperhatikan prinsip sinergi lintas desa dan lintas sektor. Kegiatan yang memberikan manfaat bagi lebih dari satu desa atau mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan diprioritaskan dibandingkan kegiatan yang bersifat individual dan terfragmentasi. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya identitas

kawasan Wikabalung sebagai satu kesatuan sistem pembangunan perdesaan.

Selain itu, aspek keberlanjutan dan kesinambungan program menjadi pertimbangan penting dalam penentuan prioritas. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal atau tidak memiliki skema pengelolaan pasca pembangunan ditempatkan pada prioritas lebih rendah. Sebaliknya, kegiatan yang memiliki peluang untuk dikelola secara mandiri oleh desa, BUM Desa Bersama, atau kelompok masyarakat diberikan prioritas lebih tinggi.

Analisis skala prioritas kegiatan dalam RPKP Wikabalung tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah, serta ketersediaan sumber pendanaan. Oleh karena itu, peninjauan dan penyesuaian prioritas dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan RPKP tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kawasan secara berkelanjutan.

Tabel 4.1.
Kriteria Penilaian

Kriteria	Skor	Penjelasan
Dampak	1–5	Seberapa besar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan
Kelayakan	1–5	Kemudahan pelaksanaan: ketersediaan SDM, biaya, dukungan kebijakan, dll.
Total Skor	-	Penjumlahan Dampak + Kelayakan (Skor Maksimal = 10)

Tabel 4.2
Daftar Kegiatan dan Skor Prioritas

No	Kegiatan	Dampak	Kelayakan	Total Skor	Prioritas
1	Sekolah Lapang Petani Kopi dan Kapulaga	5	5	10	1
2	Bantuan Alat Pascapanen (pengering, sortasi, pengemas sederhana)	5	4	9	2
3	Pembentukan/Penguatan Kelembagaan Tani (koperasi/spice cluster)	4	4	8	3
4	Pelatihan Hilirisasi Produk (roasting, minyak atsiri, packaging)	4	4	8	3
5	Festival Komoditas Lokal: “Coffee & Spice Fair”	4	3	7	4
6	Sertifikasi Lahan dan Legalitas Usaha Tani	3	3	6	5
7	Pengembangan Agroeduwisata Kebun Kopi dan Kapulaga	5	2	7	4
8	Pemetaan Potensi dan Database Komoditas Unggulan	3	4	7	4
9	Fasilitasi Kemitraan Petani dengan Industri Pengolahan/Herbal	4	3	7	4

10	Pelatihan Budidaya Modern Kapulaga (tumpangsari, pupuk organik)	4	4	8	3

Tabel menunjukkan hasil penilaian terhadap berbagai kegiatan strategis dalam pengembangan komoditas kopi dan kapulaga di kawasan Wikabalung. Penilaian dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu dampak dan kelayakan, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan total skor yang menentukan prioritas program.

Hasilnya, Sekolah Lapang Petani Kopi dan Kapulaga menempati prioritas utama (skor 10) karena memiliki dampak tinggi terhadap peningkatan kapasitas petani sekaligus tingkat kelayakan pelaksanaan yang sangat baik. Kegiatan ini dipandang sebagai pondasi penting untuk mengatasi permasalahan budidaya dan pascapanen.

Selanjutnya, bantuan alat pascapanen seperti mesin pengering, sortasi, dan pengemas sederhana memperoleh skor 9 dan menempati prioritas kedua. Hal ini karena ketersediaan alat pascapanen dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas hasil, meskipun dari sisi kelayakan sedikit di bawah sekolah lapang.

Pada prioritas ketiga, terdapat beberapa kegiatan dengan skor 8, yaitu pembentukan/penguatan kelembagaan tani, pelatihan hilirisasi produk, dan pelatihan budidaya modern kapulaga. Ketiganya memiliki peran penting dalam memperkuat organisasi petani, mendorong inovasi produk turunan kopi dan kapulaga, serta memperkenalkan teknik budidaya berkelanjutan.

Kemudian, kegiatan dengan skor 7 masuk dalam prioritas keempat, meliputi Festival Komoditas Lokal (Coffee & Spice Fair), pengembangan agroeduwisata kebun kopi dan kapulaga, pemetaan potensi dan database komoditas unggulan, serta fasilitasi kemitraan petani dengan industri pengolahan/herbal. Kegiatan-kegiatan ini lebih menekankan pada aspek promosi, pengembangan pasar, serta penguatan jejaring usaha, meski tantangan dari sisi kelayakan pelaksanaan masih cukup tinggi.

Terakhir, kegiatan sertifikasi lahan dan legalitas usaha tani memperoleh skor 6 sehingga berada di prioritas kelima. Meski penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya tarik investasi, pelaksanaannya relatif lebih kompleks sehingga mendapat skor lebih rendah dibanding kegiatan lainnya.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa strategi pengembangan kopi dan kapulaga diarahkan pertama-tama pada penguatan kapasitas petani dan sarana pascapanen, lalu diperluas ke penguatan kelembagaan, hilirisasi, dan budidaya modern, hingga akhirnya mendorong promosi, jejaring pasar, dan legalitas usaha.

Tabel 4.1.
Daftar Kegiatan dan Skor Prioritas Klaster Pariwisata

No	Kegiatan	Dampak	Kelayakan	Total Skor	Prioritas
1	Pelatihan SDM Wisata (guide, ticketing, marketing digital)	5	5	10	1
2	Pembuatan Paket Wisata Terpadu Antar Desa	5	4	9	2
3	Pembangunan Sarpras Dasar Wisata (toilet, papan arah, pos info)	4	4	8	3
4	Peningkatan Akses Jalan ke Titik Wisata Prioritas	5	3	8	3
5	Penguatan Branding dan Promosi Wisata Wikabalung	4	4	8	3
6	Pengembangan Aplikasi/Website Wisata Wikabalung	3	3	6	4
7	Festival Budaya dan Alam Wikabalung (event tahunan)	4	3	7	4
8	Pembuatan Spot Foto Instagramable dan Rest Area	3	4	7	4
9	Pengembangan Homestay oleh Pokdarwis atau BUMDes	4	2	6	5
10	Workshop Pengemasan Produk UMKM Wisata	3	4	7	4

E. Rencana Kegiatan

MATRIKS STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG

KABUPATEN BANYUMAS

1. Rencana Kegiatan pada RPKP Wikabalung Kewenangan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM/ BIDANG		KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (JUTA)					TOTAL ANGGARAN (JUTAAN) RP.	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	KONDISI EXISTING (SUDAH/ BELUM)	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030					
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
1	Bidang Pemerintahan Desa														
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembuatan Spot Foto pada Pembangunan Kolam Ikan (Rest Area)	Kadus 2 Desa Baseh	2 ha		150.000.000	200.000.000			350.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	Perluasan
		2	Pemeliharaan gazebo di rest area	Kadus 2 Desa Baseh	8 unit		24.000.000	24.000.000			48.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	Perbaikan
		3	Penataan area parkir (pengaspalan)	Kadus 2 Desa Baseh	1000 m^2			200.000.000			200.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	Perbaikan
		4	Peningkatan jalan lingkar di komplek rest area (Pengaspalan)	Kadus 2 Desa Baseh	500m^2		150.000.000				150.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	Perbaikan
		5	Pembukaan Jalan Tembus Dusun 1-Dusun 2 Desa Kalisalak Kec.Kedungbanteng	Desa Kalisalak	650 m	150.000.000					150.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	Jalan akses pariwisata desa

NO	PROGRAM/ BIDANG		KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (JUTA)					TOTAL ANGGARAN (JUTAAN) RP.	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	KONDISI EXISTING (SUDAH/ BELUM)	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030					
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
		6	Pembangunan Pipa Air untuk Perikanan dan Pertanian (Taman Wisata Ulu – Ulu)	Desa Kalisalak	1 paket	130.000.000					130.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	
		7	Pembangunan Kios Milik Desa	Desa Kalisalak	4 unit		200.000.000				200.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	
		8	Peningkatan Jalan Tembus Dusun 1- Dusun 2 Desa Kalisalak Kec.Kedungbanteng	Desa Kalisalak	450 m^2		200.000.000				200.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	
		9	Optimalisasi Lapangan Olah Raga Desa Kalisalak	Desa Kalisalak	1 paket		200.000.000				200.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	
		10	Pembangunan Wisata Ulu-Ulu	Desa Kalisalak	1 paket			195.000.000			195.000.000	APBDesa	Desa Kalisalak	Belum	
		11	Renovasi Kolam Renang Watu Tumpeng	Desa Windujaya	1 Unit	25.000.000					25.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	sudah	
		12	Pembangunan Homestay	Desa Windujaya	3 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000			330.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
		13	Pembangunan Taman Bunga	Desa Windujaya	1000 bibit		250.000.000	250.000.000			500.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
		14	Gapura Wisata	Desa Windujaya	1	50.000.000					50.000.000	APBDesa	Desa Windujaya		
		15	Peningkatan Fasilitas Lapangan Desa (Tempat Duduk)	Desa Windujaya	1 paket	160.000.000					160.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	

NO	PROGRAM/ BIDANG		KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (JUTA)					TOTAL ANGGARAN (JUTAAN) RP.	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	KONDISI EXISTING (SUDAH/ BELUM)	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030					
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
		16	Sarpras Outbond	Desa Windujaya	1 paket (kamar mandi dan wc) 4 buah		40.000.000				40.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
		17	Tenda outbond	Desa Windujaya	10 buah		10.000.000				10.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
		18	Pengadaan kandang ayam	Desa Windujaya	1 buah	17.000.000					17.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
		19	Penyertaan Modal Bumdesma	Desa Melung, Windujaya, Baseh dan Kalisalak	4 desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000			60.000.000	APBDesa	Desa Melung, Windujaya, Baseh dan Kalisalak	belum	
		20	Pengadaan Bibit Kambing Unggulan	Desa Windujaya	20 ekor		100.000.000				100.000.000	APBDesa	Desa Windujaya	belum	
3	Bidang Kemasyarakatan Desa	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Melung	2 kali		30.000.000	30.000.000			60.000.000	APBDesa	Desa Melung	Sudah	
		2	Pelatihan pengelolaan pembuatan dodol dan keripik salak untuk anggota PKK	Desa Baseh	26 orang			30.000.000			30.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	
		3	Pelatihan pembuatan kerajinan dari granit	Desa Baseh	20 orang			25.000.000			25.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	
		4	Pelatihan Ketrampilan membuat pupuk organik	Desa Baseh			50.000.000				50.000.000	APBDesa	Desa Baseh	Sudah	

2. Rencana Kegiatan pada RPKP Wikabalung Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Desa	bumdesma Kawasan Wikabalung	15	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	4.125.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Mengecek Perjanjian Sewa antara Desa dengan BUMDESMA
Bidang Kerjasama desa dan Ekonomi Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Monitoring dan Evaluasi tata kelola Kelembagaan Bumdesma Wikabalung	Bumdesma Kawasan Wikabalung	10	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	penguatan tata kelola kelembagaan Bumdesma Kawasan
Bidang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD	Windujaya	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Penguatan aparatur Pemerintah Desa dan BPD
			Kalisalak	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Penguatan aparatur Pemerintah Desa dan BPD
			Baseh	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Penguatan aparatur Pemerintah Desa dan BPD
			Melung	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Penguatan aparatur Pemerintah Desa dan BPD

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (posyandu)	Bumdesma Wikabalung	1			10.000.000			10.000.000	APBD	DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS	BELUM	Pembinaan ke Pengurus dan Kader Posyandu
Lingkungan Hidup	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Sosialisasi Pengelolaan Sampah - Desa Windujaya	Windujaya	1 paket		25.000.000				25.000.000	APBD	DLH	Belum	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalisalak - Windujaya	Kalisalak		200.000.000					200.000.000	APBD	DPU		sudah kontrak
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikesur - Melung	kalikesur / akses menuju Melung		200.000.000					200.000.000	APBD	DPU		sudah kontrak
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten Banyumas	Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangnangka II Jalan Karangnangka - Melung	Melung		300.000.000					300.000.000	APBD	DPU		sudah kontrak
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Kutaliman / akses menuju Melung		100.000.000					100.000.000	APBD	DPU		sudah kontrak

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
		Karangnangka - Melung												
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan (wikabalung)	wikabalung			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	DPU		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	OP irigasi (wikabalung)	wikabalung			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000	APBD	DPU		Surakrama (Windujaya) Wali (Melung) Watugoyang (Melung) Manggis (Melung) Kracak II (Melung) Tlaga (Baseh) Gomblang (Baseh) Tlaga (Baseh) Pagu (Melung) Metenggang (Baseh) Putri (Windujaya) Sengker (Baseh) Kracak I (Windujaya)
Bidang Kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Gamelan	Desa Baseh	1 set	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000	APBD	Dinporbudpar	Belum	Pengadaan alat gamelan
Bidang Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pelatihan Pengelolaan Manajemen Homestay	Desa Windujaya	1 kali	475.000	0	0	0	0	475.000	APBD	Dinporbudpar	Sudah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Manajemen Homestay
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Fasilitasi Honor Group Kesenian	Wikabalung	1 kali	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	APBD	Dinporbudpar	Belum	Fasilitasi Honor Group Kesenian

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
	Kabupaten/Kota													
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Media Sosial	Wikabalung	1 kali	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	APBD	Dinporbudpar	Sudah	Promosi Media Sosial
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pendampingan budidaya ikan dan pemberian demplot perikanan untuk meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Note : 1 Kelompok)	Windujaya	1 paket			50.000.000			50.000.000	APBD	DKPP	Belum	Pendampingan budidaya ikan dan pemberian demplot perikanan untuk meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Note : 1 Kelompok)
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pendampingan budidaya ikan dan pemberian demplot perikanan untuk meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Note : 1 Kelompok)	Kalisalak	1 Paket				50.000.000		50.000.000	APBD	DKPP	Belum	Pendampingan budidaya ikan dan pemberian demplot perikanan untuk meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Note : 1 Kelompok)

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Wikabalung	1 Kegiatan		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000	APBD	DKPP	Belum	Pelatihan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
Urusan Pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	pelaksanaan program takaramer daya dengan demplot komoditas cabai seluas 500 m2 untuk penumbuhan petani muda	Baseh	500 M2			15.000.000			15.000.000	APBD	Dinpertan	Belum	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pra RKA tahun 2027 bimtek manajemen peternakan dengan 30 peserta pada 2 desa (Desa Melung dan Desa Baseh), rencana tahun 2028 akan dilaksanakan bimtek manajemen peternakan dengan 30 peserta	Wikabalung	2 kali		5.900.000	5.900.000			11.800.000	APBD	Dinpertan	Belum	Pra RKA tahun 2027 bimtek manajemen peternakan dengan 30 peserta pada 2 desa (Desa Melung dan Desa Baseh), rencana tahun 2028 akan dilaksanakan bimtek manajemen peternakan dengan 30 peserta pada 2 desa (Desa Windujaya dan Desa Kalisalak)

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
		pada 2 desa (Desa Windujaya dan Desa Kalisalak)												
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Pra RKA tahun 2027 bimtek pengolahan pakan ternak dengan 15 peserta di Desa Melung, Rencana tahun 2028, 2029, 2030, dilaksanakan bimtek pengolahan pakan ternak satu desa setiap tahunnya dengan 15 peserta per desa per tahun.	Wikabalung	4 kali		3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	12.340.000	APBD	Dinpertan	Belum	Pra RKA tahun 2027 bimtek pengolahan pakan ternak dengan 15 peserta di Desa Melung, Rencana tahun 2028, 2029, 2030, dilaksanakan bimtek pengolahan pakan ternak satu desa setiap tahunnya dengan 15 peserta per desa per tahun.
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan bibit Kopi	Desa Melung	5 ha (5.500 batang)	55.000.000					55.000.000	APBN	Dinpertan	Belum	Bantuan bibit kopi

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
		Bantuan Bibit Kelapa	Desa Baseh	10 ha (1.100 batang)		66.000.000				66.000.000	APBN	Dinpertan	Belum	Bantuan bibit kelapa
			Desa Melung	5 ha (550 batang)		33.000.000				33.000.000	APBN	dinpertan	Belum	Bantuan bibit kelapa
			Desa Kalisalak	1 Paket				20.000.000		20.000.000	APBD	Dinpertan KP	belum	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota	Pemanfaatan pekarangan untuk kelompok wanita tani	Melung	1 paket		15.000.000				15.000.000	APBD	Dinpertan		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Baseh	1 Paket		137.835.000				137.835.000	APBD	Dinpertan	Belum	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Peningkatan Saluran Tersier	Desa Baseh	1 Paket	97.000.000					97.000.000	APBN	Dinpertan	Belum	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
			Desa Windujaya	1 Paket	46.000.000					46.000.000	APBN	Dinpertan	Belum	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
		Irigasi Perpipaan	Desa Windujaya	1 Paket	92.000.000					92.000.000	APBN	Dinpertan	Belum	
			Desa Windujaya	1.500 bibit	180.000.000					180.000.000	APBD	Dinpertan KP	Belum	Pengadaan bibit kelapa genjah

Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Lokasi	Volume	Anggaran			Total Anggaran Rp.			Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Kondisi Existing	Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030					
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Poktan	Wikabalung (Target 1 dwesa setiap tahun)			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	APBD	Dinpertan	Belum	
Perdagangan	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Kurasi Pelaku Usaha/UMKM untuk promosi pada Griya Kriya Dekranasda	Kabupaten Banyumas	4								DKUKMP	Sudah	Melakukan pembinaan dan kurasi di wilayah Wikabalung
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelatihan Ekspor	Kabupaten Banyumas	4								DKUKMP	Sudah	Mengikutsertakan pelaku usaha dari wilayah Wikabalung pada kegiatan Pelatihan Ekspor
Kominfo	Penyusunan Konten	Pelatihan Medsos bagi warga Desa area WIKABALUNG (WIndujaya, Kalisalak, Baseh, dan Melung)	Kab. Banyumas	2 kali		30.000.000						Dinkominfo Kab. Banyumas		
	Diseminasi Informasi	Publikasi wisate area WIKABALUNG	Kab. Banyumas	1 kali	10.000.000							Dinkominfo Kab. Banyumas		

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Wikabalung merupakan dokumen perencanaan pembangunan kawasan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bersama dalam mengembangkan potensi wilayah secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan serta karakteristik lokal. Kawasan Wikabalung yang meliputi Desa Windujaya, Desa Kalisalak, Desa Baseh, Desa Melung, dan wilayah sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kawasan dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan komoditas unggulan utama seperti kopi dan kapulaga diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada penguatan nilai tambah, pengembangan hilirisasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses pasar. Di sisi lain, potensi wisata alam dan budaya, termasuk keberadaan berbagai destinasi wisata berbasis alam di kawasan lereng Gunung Slamet, menjadi bagian penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan sumber penghidupan masyarakat perdesaan.

Implementasi RPKP Wikabalung membutuhkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kawasan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program dan kegiatan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, keterpaduan lintas sektor, penguatan partisipasi masyarakat, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

RPKP Wikabalung diharapkan menjadi instrumen untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa, sekaligus menjadi dasar dalam mendorong keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kawasan. Dengan demikian, pembangunan tidak berjalan secara parsial dan sektoral, melainkan mampu membentuk keterhubungan antardesa dan antarsektor dalam suatu kesatuan kawasan yang saling memperkuat.

Selanjutnya, pelaksanaan RPKP perlu disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penting untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perkembangan potensi kawasan, serta perubahan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, RPKP Wikabalung diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan kawasan perdesaan yang maju, mandiri, produktif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kawasan Wikabalung diharapkan mampu berkembang sebagai kawasan perdesaan berbasis potensi lokal yang memiliki daya saing, meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banyumas secara keseluruhan.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO